

AKTIF BERSAMA

INDONESIA



INDONESIA: Mitra utama bagi OECD



Indonesia akan terus menjadi mitra strategis OECD, dan penting bagi kami untuk mempertahankan dan mengintensifkan keterlibatan kami seiring peningkatan peran negara dalam perekonomian global. Indonesia adalah perekonomian terbesar kedelapan di dunia pada tahun 2016, dengan PDB sekitar USD3,0 triliun pada PPP (Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli), dan diharapkan menjadi perekonomian terbesar keempat pada tahun 2050, dengan proyeksi PDB sebesar US\$10,5 triliun pada PPP. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Indonesia semakin memegang peranan penting dalam perdagangan global. Indonesia juga merupakan salah satu demokrasi terbesar di dunia, dengan tugas yang mengesankan, yaitu mengatur populasi yang beraneka ragam secara budaya, agama, dan bahasa di wilayah yang luas. Pengalaman Indonesia dalam mencapai konsensus untuk mengatasi keragaman ini dapat menghasilkan wawasan penting bagi masyarakat internasional.

Sejak menjadi Mitra Utama Organisasi kami pada tahun 2007, Indonesia telah berkontribusi secara aktif untuk mengatasi tantangan kebijakan umum dan telah memperkaya perdebatan kebijakan di OECD. Melalui kolaborasi ini, kami juga belajar banyak dari kekayaan budaya yang besar dan kompleksitas pembuatan kebijakan di negara-negara berkembang yang besar. Dewasa ini, Indonesia berpartisipasi dalam enam badan, 12 instrumen hukum, serta beragam tinjauan dan database OECD. Indonesia merupakan Mitra Utama pertama yang menandatangani Kerangka Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2012, serta Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas pada tahun 2013. Keterlibatan semacam ini dengan Indonesia telah membantu mendorong operasional kami di Asia Tenggara. Peluncuran Program Regional Asia Tenggara pada tahun 2014, bersama dengan pendirian kantor Perwakilan Jakarta pada tahun 2015, menjadi buktinya.

Selama dua tahun terakhir, Indonesia telah mengejar agenda reformasi yang ambisius. Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, berinvestasi di sektor infrastruktur, meningkatkan pemerintah sub-nasional serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Indonesia berhasil mempertahankan dasar makroekonomi yang kuat, meningkatkan investasi, dan menyediakan pendidikan dasar gratis. Ke depannya, kemajuan dalam bidang-bidang ini akan tetap tinggi pada agenda pembangunan. Konektivitas tetap menjadi kendala utama pengembangan, dan pembuat kebijakan akan perlu mencari cara untuk mengucurkan lebih banyak pembiayaan swasta ke investasi infrastruktur. Tindakan untuk mengurangi malnutrisi pada anak-anak usia sekolah akan menjadi penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pengembangan SDM, khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional, akan menjadi penting untuk keterlibatan dalam aktivitas bernilai tambah lebih tinggi, termasuk melalui FDI. Strategi pembangunan paling ekonomis akan bergantung pada keberhasilan pemerintah meningkatkan pembiayaan publik, dan ini pada gilirannya akan ditentukan oleh keberhasilan upaya saat ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dan integritas di dalam administrasi publik. OECD siap memberikan dukungan kepada Indonesia dalam upaya-upaya ini dan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Brosur "Aktif bersama Indonesia" menyoroti bagaimana OECD dan Indonesia telah bekerja sama memajukan agenda reformasi negara, dan bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan OECD telah memperkaya pekerjaan kami dan membantu kami menemukan solusi untuk menghadapi tantangan global. Kami berharap untuk mempererat kolaborasi ini dan terus bekerja sama dengan Indonesia seiring dengan upayanya menyempurnakan kebijakan untuk kehidupan yang lebih baik.

ÁNGEL GURRÍA, *OECD Secretary-General*

Daftar Isi

OECD DAN INDONESIA	2	KETENAGAKERJAAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL	40
Sejarah Kerja Sama OECD-Indonesia	4	Mencapai cakupan kesehatan semesta	41
Program Kerja Bersama OECD-Indonesia	7	Mendorong kesetaraan gender	42
Program Regional Asia Tenggara	8	Memupuk keahlian melalui pendidikan dan pelatihan	44
Kantor OECD Jakarta	11	Mengatasi ketidaksetaraan	46
PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN, SEIMBANG, DAN INKLUSIF	14	INDUSTRI DAN INOVASI	47
Mempertahankan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi	15	Membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan	48
Mendukung pengembangan UKM	17	Memanfaatkan teknologi digital	49
Mendukung inisiatif pertumbuhan hijau	18	Meningkatkan keselamatan bahan kimia	50
Mendorong pembangunan regional dan urbanisasi	19	Bioteknologi	50
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	20	Meningkatkan pariwisata	51
Mendorong kerja sama pembangunan dan Agenda 2030	22	LINGKUNGAN DAN ENERGI	52
Data yang lebih baik untuk kebijakan yang lebih baik	24	Menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat	53
KELANCARAN FUNGSI PASAR	25	Mengatasi perubahan iklim	54
Peningkatan kontribusi investasi pada pengembangan berkelanjutan	26	Pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaan berkelanjutan	56
Mendorong perdagangan dan meningkatkan rantai nilai global	27	Memperkuat kemitraan global terkait energi bersih dan efisiensi energi	57
Mendorong persaingan sehat	29	LAMPIRAN	60
Mengembangkan sistem keuangan yang kokoh	30	Gambaran Umum OECD	60
Memperkuat konektivitas, investasi modal dan kemitraan publik-swasta	31	Perangkat hukum OECD	62
Mengembangkan pendidikan finansial berkualitas tinggi	32	Badan OECD	63
TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PUBLIK	33	Dialog dan data	63
Menerapkan reformasi peraturan	34		
Menyebarkan pemerintahan terbuka	35		
Memerangi korupsi transnasional	36		
Menuju budaya integritas di Indonesia	37		
Meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak	38		
Menaikkan standar tata kelola perusahaan	39		

OECD DAN INDONESIA

KERJA SAMA KAMI

OECD DAN INDONESIA

Kemitraan yang terus bertumbuh

Keterlibatan OECD dengan Indonesia ini telah menguat secara signifikan sejak 2007, ketika negara ini menjadi salah satu dari lima Mitra Utama organisasi. Indonesia merupakan Mitra Utama pertama yang menandatangani kedua Kerangka Perjanjian Kerja Sama (2012) dan Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas (2013) dengan Organisasi, dan menteri-menteri Indonesia secara rutin menghadiri dan berkontribusi besar terhadap Pertemuan Dewan Kementerian OECD sejak 2012. Pendirian kantor OECD pertama di Asia Tenggara di Jakarta pada bulan Maret 2015 menandai intensifikasi hubungan ini lebih lanjut, di mana kantor tersebut mendukung keterlibatan Organisasi dengan Indonesia dan Asia Tenggara, serta beberapa organisasi regional.

Tonggak pencapaian dalam kolaborasi OECD-Indonesia termasuk keputusan negara ini untuk menjadi anggota Pusat Pengembangan OECD pada tahun 2009 dan bergabung dalam Konvensi Multilateral OECD untuk Implementasi Tindakan Terkait Perjanjian Perpajakan untuk Mencegah Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) pada tahun 2017. Keduanya menandakan kesediaan pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan pemahaman dengan negara-negara OECD dan melibatkan mereka dalam semangat pembelajaran mutual. Dalam upaya ini, Indonesia juga mengikuti 12 perangkat hukum OECD dan berpartisipasi dalam sembilan badan OECD sebagai Associate atau Peserta. Negara ini juga terintegrasi ke dalam beberapa publikasi OECD utama serta database statistik.



2007

Indonesia menjadi salah satu dari lima Mitra Utama OECD melalui Program Peningkatan Keterlibatan



2009

Indonesia menjadi anggota ke-34 Pusat Pengembangan OECD dan menyetujui "pernyataan kerja sama" dengan Komite Investasi OECD



2010

OECD meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia penuh pertama



2012

Indonesia menjadi Mitra Utama pertama yang menandatangani Kerangka Perjanjian Kerja Sama dengan OECD



2013

Indonesia menjadi Mitra Utama pertama yang menandatangani Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas OECD



2014

OECD meluncurkan Program Regional Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai Co-Chair



2015

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria meresmikan kantor OECD di Jakarta



2016

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal OECD meluncurkan JWP OECD-Indonesia kedua untuk 2017-2018, dan Survei Ekonomi Indonesia OECD 2016



2017

Pembaruan Kerangka Perjanjian Kerja Sama selama periode 5 tahun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria



2017

Indonesia menandatangani MLI OECD pada BEPS bersama 71 negara pada Pertemuan Dewan Menteri (Ministerial Council Meeting/MCM) OECD 2017 di Paris



2018

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menghadiri MCM OECD pada tahun 2018

Presiden Indonesia, **Yang Mulia Bapak Joko Widodo**, dan Sekretaris Jenderal OECD, **Angel Gurria** selama kunjungan untuk meluncurkan Program Kerja Bersama OECD-Indonesia 2017-2018 dan *Survei Ekonomi Indonesia OECD* di Jakarta, 2016.



Menteri Keuangan Indonesia **Sri Mulyani Indrawati** dan Sekretaris Jenderal OECD **Angel Gurría** pada MCM OECD 2017 di Paris, Prancis.

Program Kerja Bersama OECD-Indonesia: Jalur menuju kerja sama yang lebih terstruktur

Keterlibatan OECD dengan Indonesia berdasarkan Kerangka Perjanjian Kerja Sama yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2012 dan diperbarui pada tahun 2017 oleh Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría dan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Kerangka perjanjian ini disusun berdasarkan Program Kerja Bersama (Joint Work Programme/JWP), yang biasanya berlangsung selama dua tahun, tetapi akan berjalan selama tiga tahun, mulai tahun 2019. JWP dikembangkan melalui konsultasi mendalam dengan para pemangku kepentingan kebijakan utama di Indonesia serta direktorat OECD substantif, dan didasarkan pada prioritas kebijakan strategis negara.

Rencana Kerja Bersama OECD-Indonesia berupaya membantu Indonesia mencapai target pembangunan berdasarkan standar dan praktik terbaik OECD. Program Kerja Bersama pertama pada tahun 2015-2016 membawa hasil yang signifikan, khususnya di bidang pengelolaan risiko ketahanan pangan dan subsidi produsen, sehingga mendukung OJK selagi menyusun peraturan baru untuk mengelola risiko sistemik konglomerat keuangan, dan integritas sektor publik, dengan OECD mendukung pengembangan Strategi Antikorupsi Nasional negara yang direvisi, melalui **Tinjauan Integritas**.

JWP terbaru, yang meliputi periode 2017-2018, berfokus pada reformasi iklim bisnis dan pertumbuhan dinamis, kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pertumbuhan hijau. JWP juga berfungsi membantu Indonesia dalam menerapkan komitmennya di bawah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Output penting di bawah JWP meliputi:

- **LINGKUNGAN: Peninjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia** dimulai, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana Indonesia mengutamakan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan ekonominya. Sebuah workshop GGPR diselenggarakan di Jakarta pada bulan November 2017, yang mencakup sesi khusus pada laporan OECD *Berinvestasi pada Iklim, Berinvestasi dalam Pertumbuhan*.
- **KEBIJAKAN UKM: Sebuah Tinjauan Kebijakan UKM dan Kewirausahaan Indonesia** dikembangkan pada tahun 2018 dan diluncurkan pada pertemuan Bank Dunia/IMF 2018 di Bali, Indonesia. Indonesia juga berkontribusi secara aktif pada pengembangan **Indeks Kebijakan UKM ASEAN 2018**, yang berfungsi sebagai alat benchmarking untuk memonitor dan memetakan kebijakan UKM di Negara Anggota ASEAN. Sejumlah besar pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia menghadiri lokakarya untuk mengembangkan dan meluncurkan kedua tinjauan tersebut.
- **PERPAJAKAN: Indonesia menandatangani Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Berbagai Tindakan terkait Perjanjian Perpajakan untuk Mencegah Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (BEPS)** pada bulan Juni 2017. Pemerintah juga telah bekerja untuk memajukan status Indonesia dari “sebagian sesuai” menjadi “sebagian besar sesuai” dalam Forum Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak.
- **PERIKANAN: Kebijakan perikanan dan akuakultur di Indonesia ditinjau pada edisi 2017 *Membangun Ketahanan Pangan dan Mengelola Risiko di Asia Tenggara*. Diskusi sedang berlangsung** untuk menyelesaikan upaya tindak lanjut di area ini.

JWP berikutnya, untuk meliputi periode 2019-2021, akan berfokus pada pengelolaan makroekonomi dan pembangunan infrastruktur, reformasi iklim usaha, pertumbuhan inklusif, pengembangan dan ketahanan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

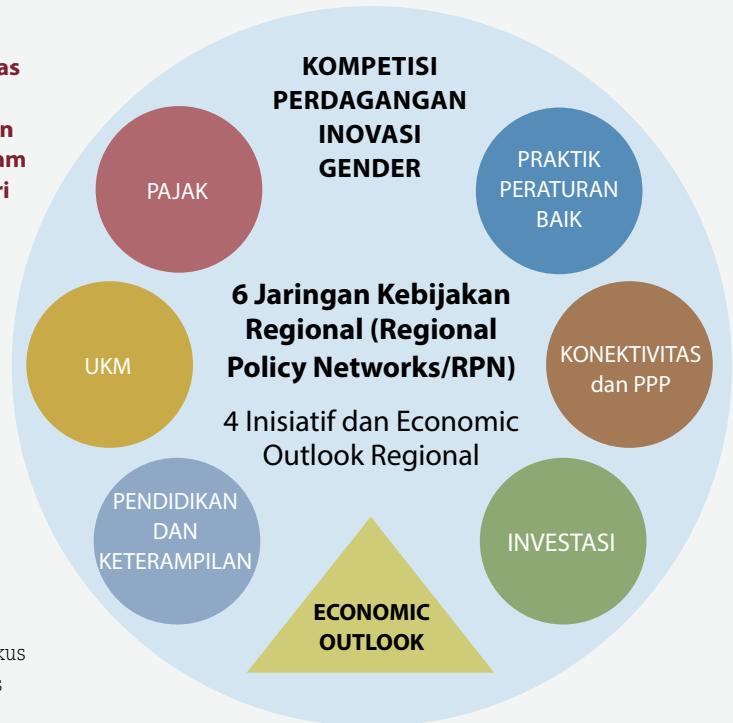
Program Regional Asia Tenggara OECD: Menghubungkan OECD dengan Asia Tenggara

OECD telah memperkuat keterlibatannya dengan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir sebagai prioritas strategis. Pada bulan Mei 2014 dalam pertemuan Dewan Menteri OECD, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría dan Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe meluncurkan Program Regional Asia Tenggara Organisasi, bersama para Menteri dan perwakilan tingkat tinggi dari kawasan tersebut.

Program ini bertujuan memanfaatkan lebih dari dua dekade upaya dengan Asia Tenggara untuk mengembangkan keterlibatan yang lebih strategis dengan kawasan, berdasarkan pendekatan seluruh pemerintah. Program ini mendukung berbagai negara dengan prioritas reformasi domestik, dan membantu upaya integrasi kawasan. Khususnya, program ini berupaya untuk mendukung implementasi Economic Community Blueprint ASEAN 2025.

Berdasarkan prinsip pertukaran pengetahuan dan pembelajaran mutual, Program ini terdiri dari enam Jaringan Kebijakan Regional (Regional Policy Network/RPN) yang memanfaatkan pekerjaan direktorat OECD substantif serta mitra badan regional. RPN ini berfokus pada area kebijakan yang diidentifikasi sebagai kepentingan strategis bagi kawasan tersebut, yaitu: i) perpajakan; ii) praktik peraturan yang baik; iii) kebijakan dan promosi investasi; iv) pendidikan dan pengembangan keterampilan; v) usaha kecil dan menengah (UKM); vi) kemitraan publik-swasta (public-private partnerships/PPP) guna mendukung konektivitas untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, Program ini telah mengidentifikasi empat area kebijakan untuk diintegrasikan secara horizontal melalui kerjanya dengan kawasan tersebut, yaitu: i) perdagangan; ii) inovasi, iii) gender dan iv) persaingan. Pusat Pengembangan OECD juga menghasilkan **Economic Outlook Asia Tenggara, Tiongkok, dan India** untuk Program setiap tahun, yang memantau tren makroekonomi jangka menengah di kawasan tersebut, serta situasi terkini dari upaya integrasi regional.

Setiap RPN terdiri dari para ahli kebijakan dari Asia Tenggara dan negara OECD, yang bersama-sama memutuskan program kerjanya



selama tahun mendatang. Aktivitas dan dampak RPN dilaporkan ke Kelompok Pengarah Program setiap tahunnya. Kelompok Pengarah ini menyediakan panduan strategis keseluruhan Program, dengan tujuan mempererat kerja sama OECD dengan kawasan tersebut. Kelompok ini mempunyai dua ketua, satu dari Asia Tenggara dan satu dari negara OECD. Pada tahun 2018, Thailand dan Korea mengambil alih posisi ketua Program.

Selain keterlibatan yang ditargetkan dengan negara Asia Tenggara tertentu, Program ini menyediakan dukungan untuk Sekretariat ASEAN dan ketua ASEAN tahunan. Pada tahun 2017, Program mendukung kedudukan ketua Filipina melalui pengembangan pelaksanaan resmi seperti Laporan **Memperkuat Kewirausahaan**

Peluncuran Program
Regional Asia Tenggara
OECD pada Forum OECD
2014 di Paris, Prancis.

FORUM 2014 OECD



Perempuan di ASEAN, serta pernyataan resmi seperti Deklarasi Inovasi para Pemimpin. Dalam kolaborasi erat dengan Komite Koordinasi ASEAN terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises/ACCMSME), OECD dan ERIA juga menyusun laporan **Indeks Kebijakan UKM ASEAN 2018**, yang dapat digunakan sebagai alat benchmarking untuk memetakan dan mengukur pengembangan kebijakan UKM di seluruh Negara Anggota ASEAN, serta pelaksanaan Rencana Tindakan Strategis ASEAN untuk Pengembangan UKM 2016-2025. Kedua tinjauan ini didanai oleh Pemerintah Kanada.

www.oecd.org/globalrelations/seaprogramme.htm



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Kantor OECD Jakarta

Kantor OECD Jakarta mendukung peningkatan keterlibatan dengan Indonesia dan Asia Tenggara, untuk memupuk pembelajaran mutual dan pertukaran praktik yang baik antara para pembuat kebijakan di kawasan tersebut dan OECD. Kantor ini mendukung pelaksanaan Program Kerja Bersama OECD-Indonesia, membantu menerapkan Program Regional Asia Tenggara, dan bekerja untuk memperkuat kerja sama antara OECD dan organisasi regional seperti ASEAN, ADB, APEC, AMRO, ERIA, dan UNESCAP.

Keputusan untuk mendirikan Kantor OECD Jakarta diambil pada bulan September 2013, berdasarkan perjanjian antara Sekretaris Jenderal OECD Jose Ángel Gurría dan Muhamad Chatib Basri, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Indonesia, pada Pertemuan Pemimpin G20 di St. Petersburg, Rusia.



“Kantor OECD Jakarta berfungsi sebagai platform untuk kerja sama OECD yang lebih intensif dengan Asia Tenggara untuk mempererat kolaborasi dengan mitranya di kawasan tersebut. Kantor ini memfasilitasi kerja OECD dengan negara Asia Tenggara, yang berfokus pada Indonesia secara khusus sebagai Mitra Utama, dan memperkuat kemitraan dengan organisasi seperti ASEAN.”

Massimo Geloso Grosso, Kepala Kantor OECD Jakarta

Kantor tersebut diresmikan pada bulan Maret 2015, selama Forum Regional Asia Tenggara OECD yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Acara dibuka oleh Bambang Brodjonegoro, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Indonesia, dan Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría.

Peresmian tersebut menjadi tonggak pencapaian kerja sama OECD dengan Indonesia, yang merupakan co-chair pertama Program Regional Asia Tenggara Organisasi, bersama dengan Jepang. Kantor Jakarta, yang berada di Kedutaan Selandia Baru, adalah kantor pertama OECD di Asia Tenggara. Kantor ini mendukung pelaksanaan JWP OECD-Indonesia yang sedang berlangsung melalui pertemuan rutin dengan para pemangku kepentingan terkait, dan memantau kemajuannya. Kantor ini juga mendukung penyelenggaraan kunjungan resmi tingkat tinggi oleh para pembuat kebijakan Indonesia ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, serta kunjungan resmi delegasi OECD ke Indonesia.



☞ 25 Maret 2015: Menteri Keuangan Republik Indonesia **Bambang Brodjonegoro** (kiri) dan Sekretaris Jenderal OECD **Ángel Gurría** meresmikan Kantor OECD baru di Jakarta.

OECD dan Indonesia



“Indonesia menyambut baik komitmen OECD untuk menjadi mitra strategis dalam mencapai target pembangunan sosial dan ekonomi. Kerja sama strategis tersebut dan kemitraan yang saling menguntungkan antara OECD dan Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi salah satu keterlibatan internasional penting yang telah diikuti Indonesia.”

Selaras dengan tahap pembangunan Indonesia, kami berharap kolaborasi kerja OECD-Indonesia dalam area prioritas umum terpilih juga diperkuat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.”

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia



“Indonesia terus menjadi negara mitra kerja sama utama OECD. Kami akan segera menyelesaikan Program Kerja Bersama kedua dengan OECD untuk periode 2017-18, dan akan memulai program ketiga, yang akan berlangsung selama tiga tahun. Program Kerja Bersama yang baru dirancang pada lima area prioritas, yang salah satunya pada “Pembangunan dan Ketahanan Berkelanjutan”. Beberapa bulan sebelum saya diminta untuk berkontribusi pada brosur ini, Indonesia mengalami serangkaian bencana alam besar. Keberlanjutan pembangunan Indonesia dan ketahanannya terasa semakin penting, dan saya berharap kerja sama masa depan antara OECD dan Indonesia akan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan negara.”

Sebagai Ketua Komite Hubungan Eksternal OECD, saya berkomitmen untuk lebih memperdalam keterlibatan OECD dengan Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Kantor OECD Jakarta yang kini beroperasi pada tahun keempatnya, dan terus berfungsi sebagai jembatan efektif antara OECD dan Indonesia. Kantor Jakarta juga semakin aktif dalam memperdalam hubungan antara OECD dan ASEAN, elemen inti aktivitas penting OECD lain di kawasan tersebut, Program Regional Asia Tenggara.”

Ivita Burmestre, Duta Besar, Perwakilan Permanen Latvia untuk OECD, Ketua Komite Hubungan Eksternal



“Keterlibatan dengan OECD telah memungkinkan para pembuat kebijakan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertukaran pandangan dan praktik yang baik untuk membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih matang. Keterlibatan ini juga memungkinkan Indonesia memanfaatkan keahlian OECD yang bisa digunakan sebagai titik referensi dalam perdebatan kebijakan nasional. Manfaat kolaborasi ini telah dirasakan oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, dan hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa semakin banyak pejabat Indonesia menghadiri rapat OECD dan proposal untuk proyek kerja sama meningkat. Seiring meningkatnya bobot Indonesia di Asia Tenggara dan dunia, saya percaya bahwa kolaborasi kami dengan OECD akan terus menguat dan berkembang.”

Dr Hotmangaradja Pandjaitan, Duta Besar Indonesia untuk Prancis



“Hubungan antara Indonesia dan OECD telah berkembang lebih lanjut selama dua tahun terakhir melalui pembaruan Kerangka Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani selama Pertemuan Dewan OECD tingkat Menteri 2017, pelaksanaan Program Kerja Bersama kedua, dan keterlibatan OECD lebih lanjut dengan Indonesia melalui Kantor Jakarta, dalam tahun keempat aktivitasnya.

Sebagai Pemimpin Informal Reflection Group OECD untuk Indonesia, saya ingin segera berkontribusi untuk semakin memperkuat kerja sama yang sangat baik antara Indonesia dan OECD dan Negara Anggota, dengan meningkatkan peluang dialog antara rekan Duta Besar OECD dan Indonesia.”

Carsten Staur, Duta Besar, Perwakilan Permanen Denmark untuk OECD, Pemimpin Informal Reflection Group untuk Indonesia



“Selama dua tahun terakhir, Indonesia telah melakukan upaya yang jelas untuk mengentaskan kemiskinan, mereformasi lingkungan bisnis, meningkatkan pembiayaan publik dan memfasilitasi investasi dalam infrastruktur. OECD telah mendukung upaya ini melalui Program Kerja Bersama OECD-Indonesia 2017-2018, sesuai dengan prioritas administrasi. Selama program ini, kami telah bekerja sama untuk meningkatkan kebijakan pajak, yang mencapai tonggak pencapaian pada tahun 2017 ketika Indonesia bergabung dalam Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Berbagai Tindakan Terkait Perjanjian Perpajakan untuk Mencegah BEPS. Kami telah mendukung pertumbuhan hijau, melalui Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia, dan kami telah berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik, terutama bagi perusahaan skala kecil dan menengah. Melalui Survei Ekonomi Indonesia OECD, kami telah melihat cara meningkatkan pendapatan pemerintah dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan ekuitas, dan bagaimana pariwisata dapat berkontribusi pada pembangunan regional yang berkelanjutan.

Upaya ini telah membawa Indonesia lebih dekat dengan OECD, sehingga mendukung Pernyataan Visi tahun 2011 agar menjadi jaringan kebijakan global yang lebih efektif dan inklusif. Kami berharap untuk mengintensifkan upaya-upaya di bawah Program Kerja Bersama OECD-Indonesia 2019-2021, seiring kerja sama kita dengan Pemerintah Indonesia untuk memajukan agenda reformasi dan mempromosikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.”

Andreas Schaal, Direktur Hubungan Global OECD dan Sous-Sherpa G20 OECD

A long-exposure photograph of a city at night, showing a multi-lane highway with light trails from cars. The city skyline is visible in the background with many lit-up buildings. The text is overlaid on the lower half of the image.

**PERTUMBUHAN
BERKELANJUTAN,
SEIMBANG,
DAN INKLUSIF**

Mempertahankan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi



Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sejak akhir Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998. Hingga 2014, pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 5% per tahun, yang berkontribusi terhadap pengurangan signifikan dalam kemiskinan. Namun, laju pertumbuhan yang akhir-akhir ini melambat menunjukkan bahwa banyak tantangan kebijakan mendasar yang masih perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. OECD telah bekerja bersama Indonesia untuk membantu merumuskan kebijakan guna mencapai target ekonomi negara.

Survei Ekonomi OECD, yang diterbitkan dua tahun sekali untuk setiap Anggota OECD dan perekonomian Mitra Utama, menganalisis tantangan ekonomi besar dan mengajukan opsi reformasi spesifik

negara berdasarkan praktik internasional yang baik. *Survei Ekonomi Indonesia* keenam dirilis di Jakarta pada bulan Oktober 2018. Survei ini berfokus pada cara mempromosikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, yang menyoroti pentingnya mengalihkan campuran pekerjaan ke posisi berkualitas tinggi dan produktivitas tinggi di sektor formal untuk memanfaatkan bonus demografi. Survei ini juga mempertimbangkan cara meningkatkan pendapatan untuk mendanai infrastruktur dan pembiayaan sosial yang akan mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Potensi pariwisata untuk mendiversifikasikan perekonomian dan mendorong pembangunan regional berkelanjutan juga disorot.

Economic Outlook OECD, yang dirilis dua kali setahun, menganalisis perkembangan terkini dalam perekonomian global dan memberikan proyeksi ekonomi bagi 47 negara, termasuk



☞ Pertemuan dengan Kementerian Pariwisata Indonesia guna mengumpulkan input untuk *Survei Ekonomi Indonesia* 2018.

Mempertahankan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi

Indonesia. Edisi Mei 2018 menggarisbawahi perluasan yang tengah berlangsung dan peningkatan investasi infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan di masa mendatang. **Economic Outlook** menekankan pentingnya terus mengurangi kemacetan struktural dan administratif untuk memperkuat pertumbuhan.

Going for Growth menyediakan gambaran umum perbandingan antara perekonomian dalam hal pengembangan kebijakan struktural dan prioritas reformasi untuk mendorong pertumbuhan dan memastikan bahwa semua pihak diuntungkan. Edisi 2018, yang dirilis pada bulan Februari, menyorot keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari reformasi pendidikan lebih lanjut, meningkatkan lingkungan regulasi untuk infrastruktur, mereformasi peraturan ketenagakerjaan untuk mengatasi informalitas tenaga kerja dan menghilangkan hambatan kewirausahaan dan investasi.

Sejak 2012, OECD juga telah bersama-sama menyelenggarakan Asian Regional Roundtable with the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Development Bank (ADB), Asian Development Bank Institute (ADBI), dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Acara tahunan ini mengumpulkan para profesional kebijakan untuk membahas kebijakan makroekonomi jangka pendek dan kebijakan struktural jangka menengah di perekonomian Asia yang Berkembang.

Economic Outlook Asia Tenggara, Tiongkok, dan India, yang dikerjakan bersama dengan beberapa organisasi regional, membahas tren ekonomi regional, menyediakan prakiraan pertumbuhan regional dan negara, dan membahas tantangan kebijakan struktural. Edisi 2016 mengandalkan kontribusi dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan Asian Development Bank Institute dan berfokus pada “Mempererat Ikatan Regional,” merupakan masalah yang sangat relevan bagi Indonesia. Laporan ini juga berisi satu bab khusus negara yang menganalisis tantangan kebijakan struktural utama bagi pembangunan Indonesia, yang disiapkan bersama dengan Kementerian Keuangan. Edisi 2017 akan memberikan wawasan dan rekomendasi utama tentang mengatasi tantangan energi di kawasan tersebut dan keberlanjutan bagi pertumbuhan inklusif.

www.oecd.org/eco

www.oecd.org/dev/asiapacific



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Mendukung pengembangan UKM



UKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UKM Indonesia berkontribusi pada hampir 97% ketenagakerjaan dalam negeri dan 56% dari total investasi bisnis.

Pada tahun 2018, OECD meluncurkan **Tinjauan Kebijakan UKM dan Kewirausahaan Indonesia**. Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian penelaahan sejawat, yang dikembangkan oleh Komite Kerja OECD untuk UKM dan Kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan, penerapan, dan efektivitas kebijakan UKM dan kewirausahaan nasional. Tinjauan kebijakan Indonesia mendapati bahwa ada banyak program publik pengembangan UKM di Indonesia, tetapi semuanya dapat dibuat lebih efisien, dengan lebih banyak yang dilakukan untuk mendukung perusahaan inovatif. Pengembangan dan penerapan strategi UKM menjadi sangat penting untuk meningkatkan keseluruhan koherensi tindakan kebijakan nasional, sasaran, dan target terukur.

www.oecd.org/cfe



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Mendukung inisiatif pertumbuhan hijau



Sebagai negara terpadat dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan kompleks meningkatkan kondisi kehidupan untuk populasi yang sedang tumbuh sekaligus menangani tekanan lingkungan yang, jika dibiarkan tanpa pengawasan, dapat mencegah pertumbuhan dan pengembangan. Penerapan kebijakan pertumbuhan hijau dapat membantu pemerintah menelaraskan perlindungan lingkungan dengan perkembangan ekonomi.

Strategi Pertumbuhan Hijau OECD dirancang berdasarkan empat laporan – *Towards Green Growth*, *Towards Green Growth: Monitoring Progress, Tools for Delivering on Green Growth*, and *Putting Green Growth at the Heart of Development*. Laporan ini memberikan saran yang ditargetkan kepada negara Anggota dan Mitra seiring mereka merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi, lingkungan, investasi, dan inovasi. Saat menyusun strategi pertumbuhan hijau untuk negara berkembang, OECD menilai kaitan antara pertumbuhan hijau dan pengurangan kemiskinan, dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan di sektor-sektor seperti pertanian dan infrastruktur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Laporan 2013, *Putting Green Growth at the Heart of Development* menunjukkan bahwa pertumbuhan hijau merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan pembangunan dalam jangka panjang.

Indonesia disertakan dalam laporan *Towards Green Growth in Southeast Asia*, yang membahas tren ekonomi, sosial, dan lingkungan utama di negara-negara ASEAN, dan menyediakan rekomendasi tentang penyertaan pertumbuhan hijau ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Laporan ini juga memberikan nasihat terkait manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan serta menanggulangi tantangan urbanisasi.

Pada tahun 2019, OECD akan meluncurkan *Green Growth Policy Review of Indonesia*, yang akan menyoroti praktik yang baik dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana Indonesia dapat beralih ke ekonomi hijau dan rendah karbon. Kebijakan pertumbuhan hijau Indonesia juga dianalisis dalam *Survei Ekonomi OECD 2015: Indonesia*, dengan fokus pada reformasi subsidi bahan bakar fosil Indonesia. Rekomendasi reformasi subsidi bahan bakar fosil serta penggunaan pajak terkait lingkungan yang lebih luas juga akan menjadi bagian dari *Survei Ekonomi OECD 2018: Indonesia*.

Proyek Urban Green Growth in Dynamic Asia OECD yang sedang berlangsung di Bandung, Indonesia, sebagai salah satu dari lima kota studi kasus untuk memeriksa opsi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang menuju pembangunan pertumbuhan hijau berkelanjutan. Laporan Bandung diterbitkan pada bulan Oktober 2016.



➤ Sebuah misi pencarian fakta OECD ke Bandung, Indonesia, pada tahun 2018 guna mengumpulkan data untuk *Green Growth Policy Review of Indonesia 2019*.

www.oecd.org/greengrowth
www.oecd.org/greengrowth/asia.htm
www.oecd.org/greencities



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Mendorong pembangunan regional dan urbanisasi

Kota-kota Asia Tenggara, termasuk kota di Indonesia, sedang mengalami urbanisasi yang pesat dan terus-menerus yang disertai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada saat yang sama, kota-kota tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk peningkatan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, konsekuensi pemanasan global dan bencana lingkungan setempat. Kota-kota tersebut juga memiliki kesenjangan pendapatan yang besar dan kurangnya akses pendidikan dan kesempatan kerja di antara penduduk perkotaan.

OECD menyadari kontribusi kota terhadap kemajuan ekonomi, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Produktivitas dan kemakmuran kota dan daerah sekitarnya terasa hingga ke daerah yang tertinggal sehingga berkontribusi terhadap kemajuan dan pertumbuhan yang produktif. Selain itu, harus disadari bahwa kota, sebagai pusat produktivitas dan inovasi, tidak saja sukses karena ukurannya tetapi juga karena struktur sistem perkotaan dan kebijakan yang mengaktifkan pertumbuhan tersebut. Pada bulan Oktober 2016, OECD juga merilis penelitian **Green Growth in Bandung** dan mengadakan lokakarya khusus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta pada bulan September 2017. Penelitian tersebut penting karena mencatat kesulitan yang dihadapi kota akibat pertumbuhan yang cepat, yang mengakui pentingnya pembangunan dan urbanisasi berkelanjutan.

Territorial Reviews OECD di tingkat nasional dan metropolitan (perkotaan dan pedesaan) bertujuan untuk memberikan diagnosis kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sebuah daerah, menilai dan merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan daya saing, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pada saat yang sama, **OECD Urban Policy Reviews** mengkaji kebijakan perkotaan di tingkat nasional dan membantu mengatasi tantangan utama tata kelola pemerintahan multi-level pada pembangunan perkotaan. Demikian pula, National Rural Policy Reviews menjelajahi kondisi pedesaan dan kebijakan teritorial yang menawarkan peluang bagi daerah pedesaan untuk berkembang.

Dinamika antar-pemerintah yang terus berubah telah menjadi semakin kompleks, dan **Multi-level Governance Reviews** membantu mendiagnosis tantangan di bidang ini dan mempromosikan rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi efektif antara tingkat pemerintahan, penting bagi pembuatan kebijakan yang efisien, investasi efektif, dan pemberian layanan.

Rekomendasi Investasi Publik yang Efektif di Berbagai Level Pemerintahan (*Recommendation on Effective Public Investment Across Levels of Government*) dan alat implementasinya membantu Mendorong pembangunan regional dan urbanisasi menilai kekuatan dan kelemahan kapasitas investasi publik suatu negara di seluruh tingkatan pemerintahan dan menetapkan prioritas perbaikan.

www.oecd.org/regional

www.oecd.org/greencities

www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit



Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat dan produsen pertanian terbesar kelima di dunia. Mendorong investasi swasta berkelanjutan di bidang pertanian di Indonesia penting untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan pertanian, memaksimalkan manfaat sektor pertanian yang kuat dan peningkatan ketahanan pangan.

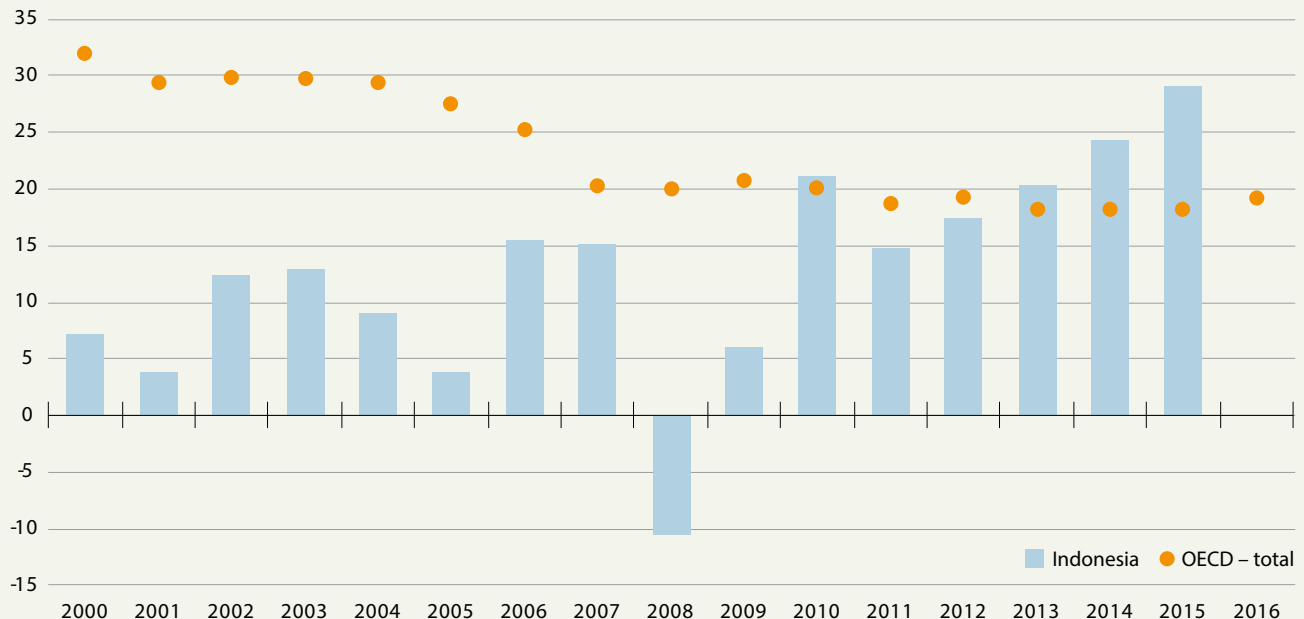
Pada bulan Oktober 2012, OECD merilis *Review of Agricultural Policies in Indonesia*. Tinjauan ini menilai kinerja pertanian selama dua dekade terakhir, mengevaluasi reformasi kebijakan pertanian Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Laporan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk secara rutin disertakan dalam laporan utama

tahunan *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation* antara tahun 2013 hingga 2016.

Laporan ini merupakan sumber unik perkiraan dukungan terkini bagi pertanian dan analisis pengembangan kebijakan pertanian di negara Anggota OECD dan di delapan negara berkembang (Brasil, Tiongkok, Indonesia, Kazakhstan, Rusia, Afrika Selatan, Ukraina, dan Vietnam).

Pada bulan Juni 2015, OECD merilis laporan *Managing Food Insecurity Risk: Analytical Framework an Application to Indonesia*, yang menyediakan dasar bukti analitis untuk meningkatkan diskusi tentang ketahanan pangan dan mengidentifikasi respons

Estimasi dukungan produsen (Producer Support Estimate/PSE), % penerimaan kotor usaha tani, 2000 – 2016



Sumber: OECD (2018), *Agricultural Support*. doi.org/10.1787/6ea85c58-en



kebijakan terbaik yang dapat memitigasi risiko ketahanan pangan dengan lebih baik. Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan yang lebih luas, termasuk aspek penting lainnya seperti masalah perdagangan dan lingkungan yang kondusif.

OECD, bersama dengan ASEAN, menyelenggarakan Konferensi Regional ASEAN-OECD mengenai Kebijakan Ketahanan Pangan di Bogor pada bulan November 2014. Konferensi tersebut merupakan kesempatan untuk bertukar pengalaman kebijakan antara negara Anggota OECD, perekonomian Asia Tenggara, dan organisasi internasional di kawasan tersebut, dengan fokus khusus pada ketahanan pangan. Konferensi ini membentuk dasar keterlibatan regional yang lebih luas dengan ASEAN, yang diluncurkan pada bulan Agustus 2015 di bawah proyek **Building Food Security and Managing Risks: A Focus on Southeast Asia**, di mana Indonesia menjadi peserta. Proyek ini menjelajahi masalah mendalam terkait ketahanan pangan dengan ASEAN dan menjelajahi opsi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang di kawasan tersebut. Proyek ini juga menyediakan platform untuk berbagi pengalaman kebijakan dari OECD dan ASEAN dan mencakup fokus pada pengelolaan perikanan, berdasarkan pelajaran dari Indonesia.

www.oecd.org/agriculture
www.oecd.org/site/rpca



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Mendorong kerja sama pembangunan dan Agenda 2030

OECD mendorong kerja sama pembangunan dan kebijakan relevan lainnya untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang bertahan, inklusif, dan berkelanjutan, pemerantasan kemiskinan, peningkatan standar hidup di negara berkembang dan masa depan ketika tidak satu negara pun bergantung pada bantuan. Salah satu elemen inti strategi OECD adalah memperkuat dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran berkesinambungan dengan negara-negara berkembang utama, termasuk Mitra Utama OECD, Indonesia.

Development Centre menghuni tempat unik dalam OECD, di mana negara-negara dapat berbagi pengalaman kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial. Pusat pengembangan ini bekerja sama dengan bagian lain OECD, terutama yang bekerja pada masalah pembangunan. Keanggotaan Pusat Pengembangan terbuka bagi anggota OECD dan non-anggota OECD, dan per Agustus 2018, Pusat Pengembangan OECD terdiri dari 52 negara anggota: 25 negara berkembang dan 27 negara anggota OECD. Indonesia telah menjadi anggota Dewan Pusat Pengembangan sejak 2009 dan terlibat dalam pengaturan program kerja dan anggaran dan dalam pembiayaan Pusat tersebut.

Development Cooperation Directorate (DCD) aktif bekerja dengan Indonesia melalui kerja sama teknis dan dialog kebijakan pada kerja sama pengembangan dan keuangan untuk pengembangan. Direktur DCD yang dipenuhi pada bulan Mei 2018 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia untuk membahas kerja sama pada peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan. Pada bulan Agustus 2018, DCD berkontribusi pada seminar teknis yang diselenggarakan di Bali untuk Mewujudkan Agenda 2030 melalui South-South and Triangular Cooperation: Enhancing Data Collection, Analysis and Monitoring & Evaluation. DCD bersama pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan acara mengenai Pembiayaan Campuran pada Forum Pembangunan Berkelanjutan Tri Hita Karana pada bulan Oktober 2018 di Bali.



Kontribusi besar terhadap sektor tersebut adalah **Prinsip Keuangan Gabungan DAC OECD** guna Membuka Pembiayaan Komersial untuk Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, di mana Indonesia dianjurkan untuk bergabung. DCD dan Indonesia mengintensifkan kolaborasi dalam mengelola kerja sama pengembangan dan melacak alur kerja sama pengembangan. Kerangka kerja pengukuran statistik baru, TOSSD, memiliki peranan penting dalam hal ini. Indonesia telah menunjukkan ketertarikan dalam kerja sama triangular dan telah berpartisipasi dalam pertemuan internasional terkait “Mengoptimalkan Nilai Tambah Kerja Sama Triangular”, yang diprakarsai oleh OECD dan Portugal pada April 2018 di Lisbon.



Kemitraan Global untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif menyediakan platform bagi pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kolaborasi di tingkat negara. Indonesia merupakan co-chair Kemitraan Global dari tahun 2012 hingga 2014, dan secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan GPEDC.

OECD juga meningkatkan kemitraan dengan yayasan dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkaya dialog kebijakan serta kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan internasional lebih jauh. **Global Network of Foundations Working for Development (netFWD)** merupakan kelompok yayasan yang telah berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak filantropi bagi pembangunan dengan membagikan pengalaman, memengaruhi kebijakan, dan mengembangkan panduan serta kemitraan inovatif. Jaringan ini memungkinkan yayasan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan, dari pembuat kebijakan hingga praktisi,

sembari secara kolektif mencari hambatan terkait implementasi proyek, keefektifan, dampak, dan hasil yang berkelanjutan. Di Asia, netFWD mengandalkan dukungan Asian Venture Philanthropy Network (AVPN), yang menyatukan yayasan paling inovatif di kawasan tersebut. Dukungan ini mencakup asosiasi filantropi perusahaan dari Indonesia seperti Japfa Foundation Indonesia atau UnLtd Indonesia. Melalui kolaborasi tersebut, netFWD dan AVPN dapat membagikan pengalaman pelaku filantropi antarkawasan, dan dengan demikian, berkontribusi terhadap pembangunan pengetahuan serta keahlian di bidang filantropi.

www.oecd.org/dev/
www.oecd.org/dac
www.oecd.org/site/netfwd/effectivecooperation.org



Data yang lebih baik untuk kebijakan yang lebih baik



Kesertaan data Indonesia dalam database statistik OECD telah mendorong negara untuk semakin mendekati standar internasional dan menyediakan indikator statistik yang komprehensif sebagai pembanding.

Data Indonesia telah disertakan dalam publikasi **How's Life 2015** OECD, dan kini Organisasi tengah bekerja secara mendalam dengan Statistics Indonesia untuk menyertakan datanya dalam database Distribusi Pendapatan, alat yang penting bagi kebijakan yang menangani kemiskinan dan disparitas pendapatan. Data Indonesia juga telah disertakan dalam **Factbook OECD** sejak tahun 2009, seperti rekening nasional dan beragam statistik ekonomi jangka pendek. Statistik ini memberikan gambaran komparatif dari pengembangan ekonomi internasional dan digunakan dalam kompilasi Indikator Pemimpin Komposit Indonesia OECD. Indikator Pertumbuhan Hijau OECD mencakup OECD dan negara-negara G20, dan ditujukan untuk membantu negara menilai serta membandingkan capaian mereka dalam menghijaukan ekonomi.

Laporan tahunan **Statistik Pendapatan di Negara-Negara Asia**, pertama kali diterbitkan pada Mei 2014, mencakup tujuh negara di Asia – Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang, Kazakhstan, serta Korea Selatan – dan berisi data komparatif serta rekomendasi kebijakan pada keseluruhan beban pajak, sebagaimana dihitung

dengan rasio pajak-ke-PDB, gabungan pajak, dan hasil penerimaan pajak yang diatribusikan ke berbagai tingkat pemerintahan. Edisi keempat telah diterbitkan pada tahun 2017, dan mencakup ulasan khusus terkait pengembangan dalam ICT.

OECD, bekerja sama dengan Asian Development Bank, telah menerbitkan publikasi baru, **South-East Asian Government at a Glance** pada tahun 2018, didasarkan pada pengalaman keberhasilan publikasi serupa untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia di tahun 2014. Mengacu pada rekomendasi dan peralatan survei OECD, publikasi tersebut mengumpulkan data komparatif baru terkait aspek utama pemerintahan publik di kawasan tersebut untuk menginformasikan reformasi sektor publik. Publikasi ini mencantumkan data terkait keuangan dan ekonomi publik, praktik penganggaran dan pekerjaan, serta area lain seperti pemerintahan terbuka, pemerintahan digital, dan manajemen sumber daya manusia. Publikasi ini mencakup kesepuluh negara ASEAN, dan juga sejumlah negara-negara OECD untuk tujuan perbandingan

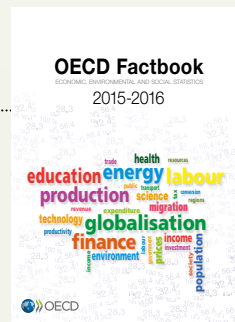
www.oecd.org/sdd

www.oecd.org/statistics

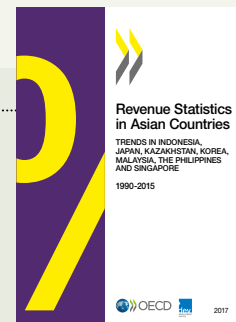
www.oecd.org/dev/asia-pacific

www.oecd.org/govataglance.htm

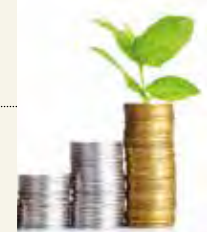
www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Peningkatan kontribusi investasi pada pembangunan berkelanjutan



Investasi internasional berkontribusi terhadap integrasi ekonomi Asia yang cepat di bawah daya dorong dari Komunitas Ekonomi ASEAN, dan telah menggerakkan dinamika ekonomi Indonesia saat ini. Arus masuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia telah mencapai tingkat rekor selama empat tahun terakhir.

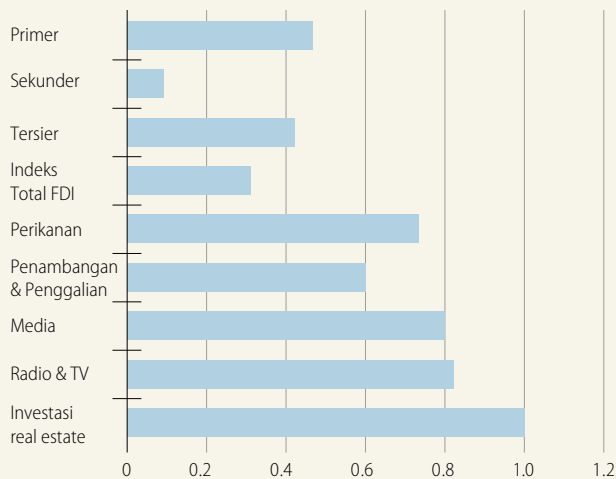
OECD mempromosikan reformasi kebijakan investasi dan kerja sama investasi internasional untuk memperkuat pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. OECD telah secara aktif mengupayakan **Tinjauan Kebijakan Investasi (IPR)** di Asia Tenggara dalam kolaborasinya dengan Sekretariat ASEAN. Indonesia mengupayakan Tinjauan Kebijakan Investasi di tahun 2010, yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan satuan kerja multilembaga. Tinjauan ini menunjukkan bahwa reformasi yang tegas terhadap kerangka kerja kebijakan investasi Indonesia telah membangkitkan kepercayaan investor dan membantu mendorong catatan arus masuk FDI. Tinjauan tersebut juga menyoroti hambatan reformasi yang masih ada.

Tinjauan kedua, yang dimulai pada paruh akhir tahun 2018, akan membahas cara mempertahankan dan melakukan diversifikasi arus masuk FDI serta memaksimalkan dampak pengembangannya. Laporan ini akan berfokus pada dorongan serta fasilitasi investasi untuk pembangunan berkelanjutan, mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab, menjaga hubungan, dan menghapus halangan untuk investasi keluar dari Indonesia. Studi tersebut juga akan menyertakan penilaian iklim investasi di salah satu provinsi.

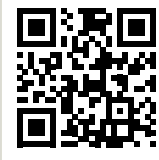
Tinjauan Kebijakan Investasi menggunakan Kerangka Kerja Kebijakan untuk Investasi (Policy Framework for Investment/PFI), sebuah alat yang komprehensif untuk reformasi iklim investasi serta mencakup dua belas area kebijakan. PFI telah diperbarui pada 2014-2015 dengan bantuan satuan kerja global yang menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Bali pada Maret 2014.

www.oecd.org/investment
www.oecd.org/investment/seasia.htm

Pembatasan FDI berdasarkan sektor di Indonesia



Sumber: OECD (2017), *FDI Restrictiveness Index*. doi.org/10.1787/c176b7fa-en



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Mendorong perdagangan dan meningkatkan rantai nilai global

Liberalisasi perdagangan memainkan peran utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Investasi, perdagangan, produksi internasional semakin terkelola dalam rantai nilai global (Global Value Chain/GVC), di mana beragam tahapan proses produksi dilakukan di negara yang berbeda. Kini, tiga per empat perdagangan internasional terdiri dari input pembelian perusahaan dan investasi barang atau jasa yang berkontribusi pada proses produksi, yang menggarisbawahi pentingnya menghapus hambatan perdagangan.

OECD menyediakan kerja terkait kebijakan dan analitik yang substansial dalam area perdagangan dengan Mitra Utamanya, termasuk Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, Organisasi telah menjalankan studi terkait rantai nilai global di Asia Tenggara, fasilitas perdagangan, perdagangan jasa, penyesuaian struktural dan perdagangan, pekerjaan dan perdagangan agrikultur, serta kaitan antara kebijakan perdagangan dan investasi asing langsung dalam sektor agro-pangan.

Untuk membantu pemerintah meningkatkan prosedur perbatasannya, mengurangi biaya perdagangan, meningkatkan arus perdagangan, dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari perdagangan internasional, OECD telah mengembangkan serangkaian **Indikator Fasilitas Perdagangan (Trade Facilitation Indikator/TFI)** yang mengidentifikasi area untuk tindakan dan memungkinkan potensi dampak reformasi untuk dinilai bagi 160 negara lebih, termasuk Indonesia. TFI digunakan untuk menyorot kekuatan serta kelemahan utama Indonesia dalam bidang fasilitas perdagangan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan untuk memprioritaskan tindakan fasilitasi perdagangan dan memobilisasi pembangunan kapasitas serta dukungan teknis bertarget.

Jaringan produksi global mengandalkan rantai logistik, yang membutuhkan infrastruktur jaringan dan layanan pelengkap yang efisien. Tidak akan ada GVC tanpa transportasi, logistik, keuangan, komunikasi, serta layanan profesional dan bisnis untuk memindahkan barang dan mengoordinasi produksi di

sepanjang rantai nilai yang bekerja dengan baik. **Layanan Indeks Pembatasan Perdagangan (Service Trade Restrictiveness Index/STRI) OECD** adalah alat yang praktis untuk membantu pembuat kebijakan mendiagnosis di mana reformasi paling dibutuhkan dan memungkinkan pemerintah mengambil pandangan lintas negara yang komprehensif serta menjelajah opsi konkret untuk meningkatkan kinerja sektor layanan, baik di tingkat unilateral, plurilateral, atau multilateral. STRI memberikan informasi yang dapat dibandingkan terkait peraturan yang ada saat ini di 18 sektor di 40 negara, termasuk Indonesia.

Kerja OECD menggarisbawahi bahwa GVC memengaruhi persaingan ekonomi, dan bahwa investasi dalam aset berbasis pengetahuan dan keahlian menjadi semakin penting dalam membantu negara menyempurnakan rantai nilai (atau meningkatkannya). Menetapkan ketentuan kerangka kerja utama dengan tepat sangat penting dan dapat menjadi langkah untuk menguatkan pertumbuhan dan inovasi dengan biaya terjangkau bagi pembuat kebijakan. Baru-baru ini OECD bekerja dengan Kementerian Riset dan Teknologi (RISTEK) Indonesia untuk



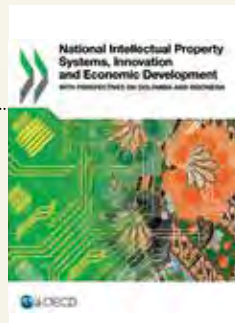
Mendorong perdagangan dan meningkatkan rantai nilai global

menjalankan studi terkait sistem kekayaan intelektual nasional serta kaitannya dengan pengembangan ekonomi dan inovasi. Rekomendasi kebijakan utama meliputi menghubungkan kebijakan kekayaan intelektual (IP) dengan kebijakan inovasi, meningkatkan ketentuan administratif dan hukum untuk sistem IP, dan menyesuaikan sistem IP untuk penggunaannya.

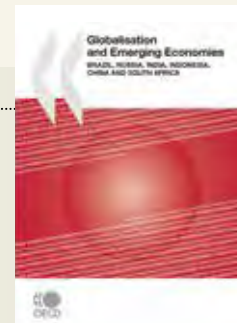
Pada tahun 2013, OECD membuat platform untuk dialog kebijakan terkait **Rantai Nilai Global, Transformasi Produksi, dan Pembangunan**. Platform tersebut memungkinkan berbagi pengetahuan antara negara Anggota OECD dan negara di luar Anggota yang pertumbuhannya secara khusus berkaitan dengan partisipasi dalam GVC, serta mereka yang tertarik untuk berbagi pengalaman terkait cara merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik untuk mempercepat pembangunan melalui integrasi ke, dan meningkatkan, dalam GVC. Selain itu, proyek OECD yang sedang berlangsung akan mengukur partisipasi dalam rantai nilai regional serta global dari negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Studi tersebut membandingkan kisah keberhasilan dan rintangan integrasi GVC di berbagai kawasan ekonomi berkembang dan mengajukan rekomendasi kebijakan untuk negara-negara berkembang.

www.oecd.org/trade

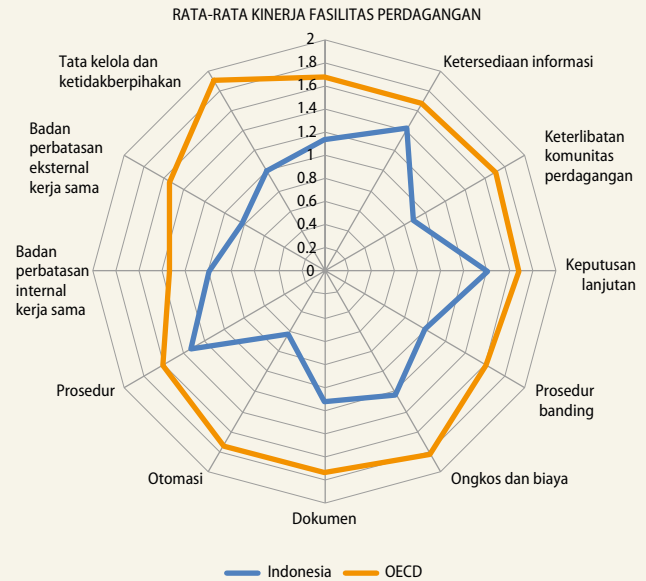
www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Indikator Fasilitas Perdagangan 2017 OECD



Sumber: OECD (2018), *Trade Facilitation Indicators*. sim.oecd.org/default.aspx?ds=TFI.

Mendorong persaingan sehat



OECD bertujuan untuk mendorong prinsip persaingan sehat dan membangun pemahaman bersama serta konvergensi lintas batas terkait kebijakan dan pelaksanaan persaingan. Pada tahun 1999, Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menetapkan undang-undang persaingan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan memiliki rekam jejak kebijakan persaingan serta pelaksanaan antimonopoli yang kuat.

Halangan peraturan bagi persaingan, seperti entri pasar, atau peraturan yang mencegah perusahaan bersaing secara bebas di pasar, dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. **Peralatan Penilaian Persaingan** OECD menyediakan metodologi dengan fungsionalitas tinggi untuk mengenali halangan terhadap undang-undang dan peraturan persaingan. OECD akan terus mendukung Indonesia, mengupayakan penilaian persaingan prioritas dari sektor logistik dengan bekerja secara dekat bersama badan nasional, dalam konteks Rencana Tindakan Persaingan ASEAN.

OECD juga berupaya untuk meningkatkan proses pengadaan publik di negara-negara anggotanya serta negara pelaku ekonomi di luar anggota. **Panduan untuk Melawan Kolusi Tender dalam Pengadaan Publik** akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran atas risiko dan biaya dari kolusi di sektor ini, dan daftar periksanya yang terperinci dapat membantu pejabat pemerintah merancang dokumen tender serta mendeteksi perilaku yang bersifat kolusi dalam penawaran tender.

Melalui lokakarya regional dan nasional, OECD membantu Indonesia serta anggota ASEAN lainnya dalam membangun kapasitas persaingan domestik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia merupakan peserta aktif dalam Program Persaingan Pusat Kebijakan Korea Selatan OECD. Pusat Kebijakan ini berfungsi sebagai titik untuk melatih dan membantu pejabat di seluruh Asia Pasifik dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta undang-undang persaingan

yang efektif. Dalam upaya penyelenggaraan bersama dengan KPPU, Pusat Kebijakan ini mengadakan lokakarya penyusunan kasus penyalahgunaan dominasi untuk KPPU dan negara anggota ASEAN di tahun 2016. Seminar lebih lanjut telah diselenggarakan pada Oktober 2018 dengan Mahkamah Agung Indonesia terkait peran alat bukti tidak langsung dalam kasus kartel.

Indonesia merupakan Peserta dalam Komite Persaingan OECD dan kontributor berkala untuk debat dalam Forum Global OECD terkait Persaingan, sebuah acara tahunan yang menyediakan peluang bagi pejabat persaingan dari seluruh dunia untuk bertemu dan bertukar pengalaman kebijakan.

www.oecd.org/daf/competition

COMPETITION ASSESSMENT TOOLKIT

GUIDELINES FOR FIGHTING BID RIGGING IN PUBLIC PROCUREMENT
Helping governments to obtain best value for money

COMPETITION - THE KEY TO PRODUCTIVITY AND GROWTH

PINDAI UNTUK MEMBACA LAPORAN

Mengembangkan sistem keuangan yang kokoh



OECD mendorong sistem keuangan berbasis pasar sehat yang stabil, terbuka, dan efisien, berdasarkan transparansi tingkat tinggi, kepercayaan diri, dan integritas. OECD telah secara aktif terlibat dengan pejabat sektor keuangan Indonesia sejak 2010.

OECD memantau perkembangan pasar saat ini dan menyarankan langkah reformasi terkait dengan investor perbankan, keamanan, dan institusional, khususnya yang berhubungan dengan perusahaan asuransi dan skema pensiun swasta. Selain itu, OECD memfasilitasi dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman terkait reformasi pasar modal, pendidikan keuangan, dan perlindungan konsumen keuangan. Temuan utama OECD diterbitkan dua tahun sekali dalam **Financial Market Trends** serta, sejak 2015, dalam **Business and Finance Outlook**.

Indonesia merupakan Peserta dalam Komite OECD mengenai Komite Pasar Keuangan dan Asuransi serta Pensiun Swasta, sekaligus badan subsider dari Komite ini. Dalam kerja sama dengan OECD, Komite APEC 2014 Tiongkok, dan Dewan Penasihat Bisnis APEC, Kementerian Keuangan Indonesia menyelenggarakan Seminar APEC mengenai Pembiayaan Risiko Bencana di Kawasan Asia Pasifik pada Juni 2014 di Yogyakarta, Indonesia. Laporan yang mengumpulkan hasil dari seminar tersebut telah diterbitkan pada Desember 2014. Pemerintah Indonesia juga menggelar Seminar APEC/OECD mengenai Pembiayaan Infrastruktur pada Agustus 2013. Kerja sama lebih lanjut pada masalah sektor keuangan yang lebih luas, khususnya pendanaan UKM, sedang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain.

www.oecd.org/daf/fin



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Memperkuat konektivitas, investasi modal, dan kemitraan publik-swasta

Rancangan Utama Pengembangan Ekonomi Indonesia 2011-2025 menyorot kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur investasi untuk menguatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, negara tetap menghadapi hambatan pendanaan: meski telah menjadi prioritas pemerintahan saat ini, anggaran negara hanya dapat mencakup 40% dari perkiraan USD360 miliar yang diperlukan untuk proyek yang direncanakan. Kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnerships/PPP) merupakan alat yang penting bagi pengambil keputusan di Indonesia untuk mempercepat pengadaan infrastruktur. Dengan memanfaatkan keahlian sektor swasta dan alokasi risiko yang tepat antara pihak publik dan swasta, pemerintah juga dapat memastikan nilai uang.

Pertumbuhan sosial dan ekonomi Indonesia yang berkembang pesat membutuhkan investasi infrastruktur yang kuat. Ini berlaku baik untuk infrastruktur ekonomi maupun sosial. Meski anggaran publik tahunan akan mendanai sejumlah proyek tersebut, investasi swasta melalui PPP menjadi semakin penting jika Indonesia memenuhi permintaan infrastrukturnya dalam tahun-tahun mendatang.

Sebagai bagian dari *Tinjauan Reformasi Peraturan Indonesia* Tahun 2012, OECD menilai kerangka kerja negara untuk pembangunan, pengadaan, dan pengelolaan PPP. Kesimpulan laporan tersebut untuk selanjutnya akan menjadi dasar bagi struktur baru untuk tata kelola PPP yang sedang diproses untuk diimplementasikan di Indonesia.

Sekretariat ASEAN, dengan dukungan dari OECD, telah mengembangkan *Prinsip ASEAN untuk Kerangka Kerja PPP*, yang disambut oleh para Pemimpin ASEAN saat Pertemuan Tingkat Pemimpin ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tahun 2014. Berdasarkan Prinsip tersebut, OECD melakukan lokakarya pembangunan kapasitas dan penilaian kerangka kerja PPP di Indonesia pada tahun 2015.

Tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur mendorong nilai uang dan memungkinkan pendanaan mengalir, sementara tata kelola yang buruk menghasilkan residu dan mematahkan semangat investasi. *Tinjauan Tata Kelola Infrastruktur OECD* dirancang untuk membantu negara meningkatkan manajemen kebijakan infrastrukturnya, mulai dari perencanaan strategis hingga penyampaian tingkat proyek. Tinjauan Tata Kelola Infrastruktur Indonesia saat ini tengah didiskusikan, dan akan mengidentifikasi kemacetan utama untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, menyediakan perbandingan dengan negara lain yang telah mengurangi kemacetan serupa, serta mengajukan tanggapan yang tepat dan dapat diterapkan untuk Indonesia.

www.oecd.org/governance

www.oecd.org/gov/governance-of-infrastructure.htm



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Mengembangkan pendidikan finansial berkualitas tinggi



OECD memiliki berbagai kemitraan dengan sejumlah pejabat Indonesia terkait kebijakan pendidikan keuangan. Literasi finansial sudah sangat diakui sebagai keterampilan dasar di dunia di mana tanggung jawab pribadi untuk kesejahteraan keuangan meningkat, dan lanskap keuangan yang menawarkan beragam produk keuangan yang rumit disampaikan melalui beberapa saluran. Oleh karena itu, pendidikan keuangan berkualitas tinggi sangat penting untuk membangun keterampilan ini di semua sektor masyarakat, dan memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan yang inklusif.

Selama beberapa tahun, Indonesia telah secara aktif mendorong pendidikan keuangan sebagai alat yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, awalnya sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan yang lebih luas. Pada tahun 2013, strategi nasional untuk literasi keuangan telah diluncurkan oleh Presiden Indonesia. Pengembangan strategi tersebut dimulai dengan penilaian literasi keuangan di seluruh populasi berdasarkan metodologi OECD, sebagaimana dirinci dalam kontribusi Indonesia terhadap publikasi *Advancing National Strategies for Financial Education* G20/OECD. Setelahnya, Indonesia juga membagikan praktik pendidikan keuangan yang baik pada *Pedoman Kebijakan Strategi Nasional untuk Edukasi Keuangan* Jaringan Internasional OECD untuk Pendidikan Keuangan (International Network on Financial Education/INFE), yang disusun pada tahun 2015 untuk menjawab ajakan dari Pimpinan G20. Indonesia berpartisipasi dalam *laporan perbandingan G20/OECD INFE terkait literasi keuangan usia dewasa di negara-negara G20* yang

diterbitkan pada tahun 2017, yang menggunakan **Peralatan OECD/INFE** untuk mengukur inklusi keuangan dan literasi keuangan. Indonesia menunjukkan keseluruhan nilai literasi keuangan, menggabungkan elemen pengetahuan keuangan, sikap dan perilaku, sebesar 13,4 dari total nilai 21, sedikit lebih tinggi dibanding nilai rata-rata negara G20 yang berpartisipasi yaitu 12,7. Selain itu, pada tahun 2018 Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam komponen Literasi Keuangan dari Program Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA) OECD untuk mengukur tingkat literasi keuangan di antara pelajar berusia 15 tahun.

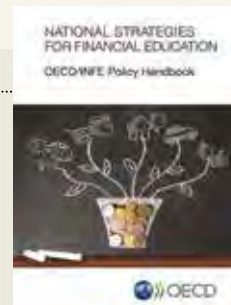
OECD mengembangkan peralatan kebijakan dan pedoman praktis edukasi keuangan melalui OECD/INFE, serta partisipasinya dalam kerja G20. Didirikan tahun 2008, OECD/INFE menggabungkan keahlian publik dari lembaga publik di lebih dari 110 negara untuk menjalankan upaya analitis dan mengembangkan praktik yang baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan anggota Dewan Penasihat OECD/INFE. Bank Indonesia juga merupakan anggota tetap OECD/INFE.

Pada Juni 2016, OECD dan OJK menandatangani memo kesepakatan untuk bekerja sama dalam sejumlah masalah keuangan, termasuk perlindungan konsumen keuangan, pendidikan keuangan dan inklusi keuangan, serta masalah terkait tata kelola perusahaan. OECD dan OJK berhasil menyelenggarakan Seminar Regional Tingkat Tinggi mengenai Pemberdayaan MSME melalui Literasi dan Inklusi Keuangan di bulan yang sama, yang dihadiri lebih dari 300 peserta.

www.oecd.org/finance/financial-education



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN :





TATA KELOLA PUBLIK DAN PERUSAHAAN

Menerapkan reformasi peraturan



Praktik peraturan yang baik (Good Regulatory Practice/GRP) merupakan agenda prioritas untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dan integrasi regional ASEAN.

Implementasi GRP sangat penting untuk memfasilitasi pembangunan sektor swasta dengan mengurangi beban peraturan pada industri, membuat lingkungan peraturan yang jelas dan stabil untuk investasi, serta memfasilitasi partisipasi UMKM dalam ekonomi formal. Implementasi ini merupakan elemen utama agenda tata kelola publik, yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti, serta proses yang transparan dan dapat diprediksi.

OECD memiliki keterlibatan yang panjang dan kuat dengan Indonesia terkait reformasi peraturan, baik secara bilateral maupun regional, melalui APEC dan ASEAN. Pada tahun 2012, Indonesia adalah anggota ASEAN pertama yang menjalani Tinjauan Reformasi Peraturan OECD, dan pemerintah Indonesia merupakan anggota biro Jaringan GRP ASEAN- OECD. Indonesia secara berkala berpartisipasi dalam Komite Kebijakan Peraturan dan Jaringan Regulator Ekonomi OECD.

Tinjauan Reformasi Peraturan OECD: Indonesia memasukkan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas pemerintah guna memastikan peraturan berkualitas tinggi, dan implementasinya telah didukung oleh OECD dan Pemerintah Inggris Raya. Strategi Nasional Reformasi Peraturan didasarkan pada rekomendasi yang disediakan dalam tinjauan ini.

Inventarisasi GRP yang komprehensif di semua negara ASEAN akan diluncurkan pada Oktober 2018. Laporan tersebut menyorot upaya Indonesia dalam memajukan GRP di beragam area dan peluang untuk penguatan lebih lanjut, termasuk pemotongan pita, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi ex post, dan e-government. Laporan ini memberikan dasar bagi keterlibatan aktif dengan OECD dalam mendukung peningkatan GRP lebih jauh.

www.oecd.org/gov/regulatory-policy
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/southeast-asia.htm
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/grpn.htm



Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Indonesia dan Angel Gurría, Sekretaris Jenderal OECD saat menandatangani Konvensi Dukungan Administratif Bersama dalam Urusan Pajak, G20 Cannes, November 2011, Cannes, Prancis.

Foto: Presidensi Republik Prancis.



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Menyebarkan pemerintahan terbuka

Reformasi sektor publik – terinspirasi dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan – memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dan menjaga keberlanjutan serta pembangunan sosial ekonomi yang inklusif.

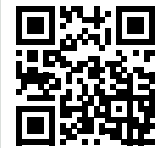
Kebijakan pemerintahan terbuka merupakan instrumen yang efektif bagi penyampaian layanan publik, dan untuk membangun relasi antara pembuat kebijakan, warga, dan pelaku bisnis.

Selama sepuluh tahun terakhir, melalui komitmennya untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan sebagai anggota pendiri Kemitraan Pemerintahan Terbuka, Indonesia telah menunjukkan minat yang kuat dalam diseminasi prinsip dan praktik pemerintahan terbuka di Asia Tenggara dan dunia. Lebih jauh lagi, kontribusi Indonesia terhadap pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB menunjukkan perspektifnya yang unik terkait cara menghubungkan reformasi pemerintahan terbuka nasional dengan agenda reformasi multilateral pelengkap.

Saat ini OECD mendukung implementasi prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia melalui dua inisiatif: **Tinjauan Pemerintahan Terbuka Indonesia** OECD, yang menilai, melalui mekanisme penelaahan sejawat OECD, praktik dan kebijakan pemerintahan terbuka Indonesia serta menyediakan rekomendasi yang dapat dilaksanakan terkait cara meningkatkan reformasi sektor publik yang tengah berjalan, dan Jaringan Pemerintahan Terbuka dan Inovatif di Asia Tenggara. Jaringan ini, di mana Indonesia menjadi co-chair, mendorong dialog kebijakan, transfer pengetahuan,



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



dan berbagi praktik terbaik antara OECD dan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang pemerintahan digital, pemerintahan terbuka, inovasi sektor publik, dan keterlibatan sipil dalam pembuatan kebijakan.

www.oecd.org/gov

“Hanya dengan menerapkan prinsip Pemerintahan Terbuka, pemerintah di semua tingkat dapat membangun legitimasi dan memperkuat kepercayaan publik.”

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Seremoni Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik, 15 Desember 2015

Memerangi korupsi transnasional



Korupsi mengacaukan pasar, melemahkan pemerintahan, meningkatkan biaya dalam menjalankan bisnis, mempertajam ketidakadilan, dan mengikis upaya pengembangan berkelanjutan. Di samping itu, korupsi akan merugikan warga yang paling miskin. Oleh karena itu, melawan penyuapan merupakan bagian tak terpisahkan untuk menciptakan ekonomi dunia yang lebih kuat, bersih, dan setara.

Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dalam hal nominal PDB. Agar dapat memenuhi tujuan ekonomi utamanya untuk meningkatkan produksi, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjawab kebutuhan kelas konsumen yang berkembang pesat, dan tingkat urbanisasi yang cepat, Indonesia memerlukan investasi yang substansial dalam jaringan layanan dan infrastruktur. Namun, korupsi telah meresap dalam proyek infrastruktur skala besar di seluruh dunia, dan dapat secara negatif memengaruhi pengembalian investasi infrastruktur. Selain itu, perusahaan Indonesia semakin banyak yang meluas ke luar negeri untuk mencari pasar baru bagi produknya, termasuk minyak sawit, batu bara, produk perikanan dan agrikultur, energi, dan peluang investasi baru. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun dan menjaga reputasi untuk praktik bisnis lintas negara yang bersih dan adil agar sepenuhnya memperoleh akses menuju pasar baru. **Konvensi mengenai Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional** (Konvensi Anti-Penyuapan) merupakan instrumen global terkemuka untuk memberantas pemberian penyuapan dalam bisnis internasional. Dengan menyetujui Konvensi Anti-Penyuapan, Indonesia mengirimkan pesan yang kuat terhadap komunitas global bahwa Indonesia tidak akan menoleransi korupsi dalam bisnis internasional.

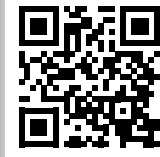
Konvensi Anti-Penyuapan merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum; negara yang menyetujuinya perlu menetapkan tindakan pidana untuk penyuapan pejabat publik asing dalam undang-undang negaranya yang berlaku untuk individu, perusahaan, serta untuk menerapkan kebijakan yang efektif guna mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum penyuapan tersebut. Kelompok Kerja terkait Penyuapan OECD, yang terdiri dari 44

Kelompok Konvensi Anti-Penyuapan (seluruh negara anggota OECD ditambah 8 negara di luar anggota), memantau implementasi Konvensi tersebut melalui proses penelaahan sejawat yang solid dan sistematis.

Tujuan penting dari kerja sama OECD dengan Indonesia adalah akses Konvensi Anti-Penyuapan OECD. Dalam rangka memenuhi tujuan ini, OECD sangat mendukung upaya Indonesia untuk menetapkan kerangka kerja institusional dan legislatif yang efektif guna memerangi penyuapan pejabat publik asing. Lebih jauh lagi, sebagai anggota G20, Indonesia setuju, melalui Rencana Anti-Korupsi G20 2017-2018, bahwa Indonesia akan “secara aktif berpartisipasi dengan Kelompok Kerja OECD terkait Penyuapan untuk menelusuri kemungkinan ketaatan terhadap Konvensi Anti-Penyuapan OECD” Indonesia telah berpartisipasi secara berkala dalam pertemuan Kelompok Kerja terkait Penyuapan sejak 2009. Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah berpartisipasi dalam pertemuan OECD bagi pejabat penegak hukum. Lebih lanjut lagi, OECD telah bekerja bersama Indonesia dalam menetapkan kerangka kerja hukum untuk mengatasi penyuapan asing. Selain itu, sejak 2001, Indonesia telah menjadi anggota aktif Inisiatif Anti-Korupsi untuk Asia Pasifik.

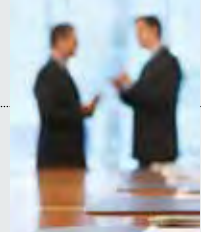
www.oecd.org/corruption

www.oecd.org/corruption/asiapacific



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Menuju budaya integritas di Indonesia



Kasus-kasus terkini di Asia Tenggara dan juga tempat lain telah menunjukkan bahwa menanggapi secara kasus per kasus bukanlah pendekatan yang efektif untuk mencabut akar korupsi. Sebaliknya, pemerintah dan aktor di luar pemerintah harus bekerja sama untuk membangun budaya integritas di seluruh masyarakat serta sektor publik. OECD mengajukan Rekomendasi Integritas Publik yang mewakili pendekatan keseluruhan pemerintah dan masyarakat menuju integritas ini, membantu pembuat kebijakan menerapkan secara umum serta mengimplementasikan reformasi anti-korupsi di seluruh jajaran pemerintah.

OED mendukung Indonesia untuk memastikan sistem integritas yang koheren dan komprehensif di seluruh jajaran pemerintah, mengatasi area risiko seperti konflik kepentingan, pelobian, dan pengambilan kebijakan. Dalam kerja sama secara erat dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), OECD melakukan tinjauan integritas untuk menguatkan reformasi anti-korupsi dan langkah yang selaras dengan Strategi Anti-Korupsi Nasional.

Tinjauan integritas adalah langkah luar biasa untuk menghubungkan Indonesia dengan pakar integritas dari negara-negara OECD, dan tinjauan tersebut juga berfungsi sebagai latihan ruang lingkup negara dalam kerangka kerja Inisiatif Anti-Korupsi untuk Asia Pasifik ADB/OECD, di mana Indonesia menjadi anggota aktif.

Pengadaan publik telah diidentifikasi sebagai area risiko khusus di Indonesia. Indonesia telah diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Serikat Pekerja Praktisi Terkemuka Pengadaan Publik (Leading Practitioners on Public Procurement/LPP) OECD, yang menyediakan forum untuk mendiskusikan opsi kebijakan dan memastikan peningkatan berkelanjutan dalam pengadaan publik. Topik kolaborasi antara Indonesia dan OECD mencakup pengadaan digital, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan publik, dan manajemen proses pengadaan publik yang rumit terkait infrastruktur besar.

Dalam area risiko integritas bea cukai, Indonesia telah berkontribusi terhadap Kompilasi Praktik Integritas yang Baik dalam Bea Cukai G20, yang dikumpulkan dalam kemitraan dengan OECD, dengan membagikan langkah transparansi dan akuntabilitas yang relevan dalam bea cukai. Bersama dengan data terbuka dan transparansi anggaran, integritas dalam bea cukai merupakan area fokus bagi Kelompok Kerja Anti-Korupsi G20.

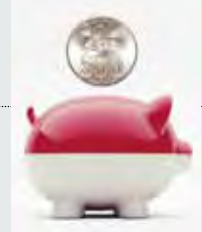
www.oecd.org/gov/ethics/publicsectorintegrityreviews.htm



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak



OECD memainkan peranan penting dalam pengembangan standar dan panduan pajak internasional sebagaimana ditunjukkan dalam dukungan internasional yang kuat untuk instrumen utamanya terkait transparansi dan melawan pengelakan dan penghindaran pajak.

Kementerian Keuangan Indonesia dan OECD telah memperbarui Memo Kesepakatan (MoU) pada Januari 2017, yang memfasilitasi implementasi kegiatan teknis seperti 'Seminar mengenai Perjanjian Pajak, Masalah Khusus' di Indonesia pada Oktober 2017. Indonesia memainkan peranan utama dalam melawan pengelakan dan penghindaran pajak sebagai anggota G20, satu-satunya pemerintahan dari Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia memegang peranan penting sebagai peserta dalam Komite Urusan Fiskal OECD.

Proyek OECD/G20 Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) untuk memperbaiki defisiensi dalam sistem pajak internasional, telah disampaikan pada Oktober 2015, yang disetujui oleh Dewan OECD serta para Kepala Negara dan Menteri Keuangan G20. Kini Proyek BEPS berfokus pada implementasi, dan Indonesia, salah satu anggota dari total

116 negara, berpartisipasi dengan kesempatan yang setara dalam Kerangka Kerja Inklusif BEPS. Pada Juni 2017, Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani **Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Berbagai Tindakan Terkait Perjanjian Pajak untuk Mencegah BEPS (MLI)**, yang akan menerapkan langkah perjanjian pajak untuk memperbarui jaringan perjanjian pajak bilateral yang ada dan mengurangi peluang pengelakan pajak oleh perusahaan multinasional. Konvensi yang baru, kini dengan 78 penanda tangan, juga akan memperkuat ketentuan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian, termasuk melalui arbitrase mengikat yang wajib, dengan demikian akan mengurangi pajak ganda dan meningkatkan kejelasan pajak.

Forum Global Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak mengumpulkan 153 yurisdiksi, termasuk semua Anggota OECD dan negara-negara G20. Indonesia telah menjadi anggota sejak 2009. Indonesia telah menandatangani **Konvensi Dukungan Administratif Bersama dalam Urusan Pajak** multilateral pada tahun 2011 yang mulai berlaku sejak Mei 2015. Pada Mei 2014, Indonesia mengikuti **Deklarasi Pertukaran Informasi Otomatis** OECD. Indonesia telah berkomitmen terhadap penerapannya, dengan pertukaran pertama yang akan dilakukan pada tahun 2018.

www.oecd.org/tax
www.oecd.org/tax/beps.htm
www.oecd.org/tax/transparency



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Multilateral Instrument
to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting

Information Brochure



Peremuan Komite Teknis Asia Pasifik terkait BEPS - Yogyakarta - 2015



Menaikkan standar tata kelola perusahaan

Salah satu prioritas Indonesia adalah meningkatkan iklim investasi negara guna memacu lebih banyak investasi asing dan domestik. Baru-baru ini pemerintah telah mengintensifkan upaya reformasi untuk mendorong tata kelola perusahaan yang kuat. Dekrit Presiden (No. 13/2018) mengenai kepemilikan manfaat, yang diterbitkan Maret 2018, mengharuskan entitas bisnis menyerahkan identitas pemilik manfaatnya kepada pemerintah. Dekrit ini juga memberi mandat firma untuk memperbarui data kepemilikan manfaatnya setiap tahun. Peraturan ini, yang melengkapi perjanjian AEOI, semestinya dapat lebih memberi kekuatan kepada pejabat publik untuk melawan korupsi dan pencucian uang, serta pengelakan dan penghindaran pajak.

Upaya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang diakui secara internasional oleh perusahaan merupakan penentu keputusan investasi, yang memengaruhi kepercayaan investasi, beban modal, dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari kelompok investor yang lebih besar. OECD telah bekerja sama dengan Indonesia untuk mendukung upaya reformasi dan manfaat yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Kerja sama ini dilakukan melalui Komite Tata Kelola Perusahaan OECD, Meja Bundar Asia terkait Tata Kelola Perusahaan, Inisiatif Tata Kelola Perusahaan Asia Tenggara-OECD, dan Dialog Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan Indonesia-OECD.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD berfungsi sebagai rujukan utama untuk upaya ini. Pada tahun 2014, OECD memulai tinjauan Prinsip tersebut dan Indonesia berpartisipasi sebagai Rekan, guna memastikan standar yang diperbarui benar-benar menunjukkan perspektif internasional. Indonesia telah diundang untuk ambil bagian dalam upaya pengumpulan data dan informasi oleh Komite, seperti Buku Fakta Tata Kelola Perusahaan OECD dan laporan kemajuan terkait Rekomendasi Gender OECD yang membahas tentang perempuan dalam dewan serta manajemen senior.

Tahap pertama Dialog Kebijakan Indonesia-OECD terpusat pada peningkatan pengungkapan kepemilikan manfaat dan kontrol sebagai bagian dari keseluruhan upaya untuk meningkatkan praktik dan standar tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2013, laporan *Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Policy Options for Indonesia* telah disepakati berdasarkan konsensus. Laporan ini menilai biaya, manfaat, serta kepraktisan dari beragam pendekatan kebijakan dan menyarankan opsi agar lebih baik dalam mengidentifikasi kepemilikan manfaat utama di Indonesia. Laporan tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap informasi yang dapat diandalkan tentang kepemilikan, termasuk identitas pemilik yang memegang kendali, dan struktur kontrol perusahaan yang terdaftar di Indonesia.

Tahap kedua Dialog berfokus pada transparansi dan aturan adil yang mengelola disiplin pasar, khususnya pencatatan lewat pintu belakang (*back-door listing*). Seminar untuk bertukar kebijakan dan praktik terbaik terkait pencatatan lewat pintu belakang diselenggarakan setiap rentang dua tahun. Laporan *Improving Corporate Governance in Indonesia: Policy Options and Regulatory Strategies for Tackling Backdoor Listings* pertama kali diterbitkan pada tahun 2016, yang menawarkan panduan bagi pembuat kebijakan dan regulator untuk memastikan fungsi yang transparan dan efisien dari pasar untuk kontrol perusahaan dan keseluruhan pengembangan serta pertumbuhan pasar.

Tahap ketiga berfokus pada tata kelola perusahaan konglomerat keuangan. Laporan ini hadir seiring berlakunya aturan baru untuk mengelola risiko sistemik konglomerat keuangan. Pertemuan pakar teknis diselenggarakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada Desember 2015. Pada Juli 2017, OECD menyelenggarakan Forum Pakar Tata Kelola Perusahaan di Jakarta, Indonesia, yang dikelola bersama dengan OJK.

www.oecd.org/corporate



PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN

Mencapai cakupan kesehatan semesta



Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai cakupan kesehatan semesta pada tahun 2019. OECD menyediakan saran tentang cara mengukur kemajuan terhadap tujuan penting ini, termasuk melalui pelacakan cara pembelanjaan uang serta menilai kualitas barang dan jasa kesehatan.

Dimensi penting cakupan kesehatan yaitu akses ke produk farmasi. Indonesia telah berpartisipasi dalam dua pertemuan pertama jaringan pakar Asia Pasifik terkait Akses Obat-Obatan dalam Cakupan Kesehatan Semesta yang diadakan pada 2014 dan 2015, serta pelatihan global pertama tentang cara menggunakan data akun kesehatan dengan lebih baik untuk memberi informasi kepada pembuat kebijakan, yang diselenggarakan di Paris pada April 2014.

Dalam kolaborasi bersama Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk Asia Tenggara dan Bank Dunia, kerja sama antara OECD dan Indonesia telah berfokus pada peningkatan informasi kesehatan. Statistik kesehatan di Indonesia juga disajikan dalam publikasi Sekilas tentang Kesehatan Asia Pasifik edisi 2016. Laporan ini menawarkan kerangka kerja komprehensif

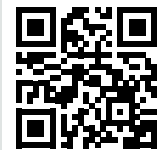
untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem kesehatan untuk 27 negara Asia Pasifik. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan Indonesia dalam persentase PDB tergolong sangat rendah yaitu sebesar 3,6% pada tahun 2014 (dibandingkan rata-rata 4,7% di Asia), meski telah mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen sejak 2010. Dua per lima total belanja kesehatan berasal dari sumber pemerintahan umum di tahun 2014.

Indonesia juga merupakan peserta aktif dalam Jaringan Bersama Anggaran Lansia dan Pejabat Kesehatan OECD-ASIA, yang pertemuannya diadakan di Tokyo pada Mei 2017.

www.oecd.org/health



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Mendorong kesetaraan gender

Indonesia telah melawan ketidaksetaraan gender dengan memperkenalkan beberapa reformasi, misalnya kuota perempuan dalam struktur partai politik di tingkat regional dan nasional. Namun, perubahan lebih lanjut tetap dibutuhkan, karena partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik masih rendah.

OECD bertujuan untuk meningkatkan kebijakan dan mendorong kesetaraan gender, baik di negara Anggota OECD maupun di luar Anggota. Pada tahun 2010, diluncurkan Inisiatif Gender OECD untuk memperkuat kesetaraan gender dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan, serta diskusi masalah-masalah ini dengan fokus kawasan Asia/Pasifik yang disertakan dalam *Sekilas tentang Masyarakat: Asia/Pasifik 2014*. Program Regional

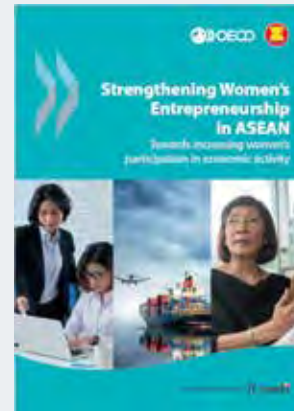
Asia Tenggara OECD mengembangkan inisiatif tertarget yang akan fokus pada masalah gender khusus kawasan tersebut, termasuk Indonesia, dan mendukung lebih jauh upaya untuk meningkatkan peluang ekonomi perempuan dalam kerja sama dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Indeks Gender dan Institusi Sosial (Social Institutions and Gender Index/SIGI) OECD, yang diluncurkan pada tahun 2009, merupakan database terkait institusi sosial yang diskriminatif dan menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Database tersebut disertai profil negara mendalam untuk lebih dari 160 negara di semua kawasan, termasuk Indonesia. Menurut SIGI terakhir pada tahun 2014, Indonesia menunjukkan tingkat menengah diskriminasi terhadap perempuan, yakni peringkat 53 dari 108.



SIGI mencatat institusi sosial yang diskriminatif di lima area: pengambilan keputusan dalam keluarga, preferensi anak laki-laki, akses yang aman atas tanah dan aset, kebebasan sipil, dan kekerasan terhadap perempuan. Variabel menganalisis kehadiran hukum, praktik, dan sikap untuk menangkap diskriminasi terhadap perempuan secara holistik. Diperbarui secara berkala, dengan edisi ketiganya yang dirilis pada November 2014, SIGI merupakan satu-satunya database yang menyediakan data tren yang solid terkait institusi sosial yang diskriminatif.

Laporan 2014 tentang **Women, Government and Policy-Making in OECD countries: Fostering Diversity for Inclusive Growth** menyajikan data pembandingan dan tolok ukur kebijakan atas akses perempuan terhadap peran pengambilan keputusan. Upaya ini menyediakan fondasi untuk **Panduan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Publik OECD** dan berkontribusi terhadap Inisiatif Gender OECD serta Strategi Pengembangan OECD. Laporan berjudul **Closing the Gender Gap: Act Now** diterbitkan pada Desember 2012 sebagai bagian dari Inisiatif Gender OECD, bersama dengan portal Data Gender OECD yang baru dan mencakup anggota OECD serta Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, Rusia, dan Afrika Selatan. Laporan tersebut memeriksa tren terbaru mengenai kesetaraan gender dalam Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kewirausahaan serta membahas cara terbaik untuk menutup kesenjangan gender yang masih ada di area ini. Pada tahun 2017, OECD menerbitkan laporan **Strengthening Women's Entrepreneurship in ASEAN**, yang



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



mengidentifikasi kebijakan dan program untuk mendukung kewirausahaan perempuan di ASEAN. Laporan ini juga memeriksa pendidikan yang lebih luas serta pengaturan pasar kerja untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di ASEAN.

www.oecd.org/dev/development-gender
www.genderindex.org
www.oecd.org/social
www.oecd.org/dev
www.oecd.org/gender/closingthegap.htm



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Memupuk keahlian melalui pendidikan dan pelatihan

Indonesia telah meningkatkan partisipasi di seluruh tingkat pendidikan, tapi tantangannya kini adalah mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung setiap warga negara Indonesia untuk mencapai potensi mereka. Melengkapi warga negara dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai akan memungkinkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memajukan rantai nilai global.

Indonesia telah berpartisipasi dalam **Program untuk Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA)** OECD yang dilaksanakan tiga tahun sekali sejak 2000. Kinerja sains Indonesia meningkat sebesar 21 poin nilai antara tahun 2012 dan 2015. Hal ini menjadikan Indonesia negara kelima tercepat yang meningkatkan sistem pendidikannya di antara 72 negara yang berpartisipasi dalam perbandingan ini. Namun, jumlah tantangannya tetap sama. Lebih dari 55% nilai pelajar berada di bawah Tingkat 2 dalam sains – dipertimbangkan sebagai tingkat dasar kecakapan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pelajar Indonesia dari latar belakang yang kurang beruntung hampir tertinggal dua tahun dibanding temannya yang lebih beruntung. Selain itu, hanya 11%

pelajar Indonesia yang ulet, dibanding rata-rata OECD (29%), menandakan bahwa lebih sedikit pelajar Indonesia dari latar belakang kurang beruntung yang berhasil memberikan performa terbaik. Semua data tersebut menandakan bahwa langkah untuk meningkatkan performa perlu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk komunitas dan kawasan paling miskin.

Pada Maret 2015, OECD menerbitkan **Education in Indonesia: Rising to the Challenge**, tinjauan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia yang mendalam. Analisis tersebut memberikan perspektif mengenai permintaan modal SDM dari pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat sistem pendidikan.

Indonesia juga disertakan dalam **Education at a Glance**, publikasi tahunan yang menyajikan data terperinci sistem pendidikan di perekonomian G20 dan OECD. Analisis data ini memungkinkan Indonesia menetapkan tolok ukur sistem pendidikannya berdasarkan sejumlah sistem pendidikan dengan kinerja tertinggi di dunia.





Southeast Asia Regional Policy Network on Education and Skills (SEARN) OECD dibangun pada platform inisiatif Strategi Ketenagakerjaan dan Keterampilan OECD di Asia Tenggara (Employment and Skills Strategies in Southeast Asia/ESSSA) yang dibentuk tahun 2008 untuk memfasilitasi dialog antara kementerian tenaga kerja dan keterampilan dari Negara Anggota ASEAN. Indonesia telah menjadi peserta aktif dalam pertemuan tahunan para ahli Jaringan tersebut, yang mengumpulkan pejabat pemerintah senior dari ASEAN, serta mitra dari kawasan tersebut, untuk memperdalam pembelajaran dan pertukaran regional antarnegara. Pertemuan Jaringan terakhir diadakan pada Oktober 2017 di Hanoi, Vietnam.

Indonesia terus menempatkan fokus pada pengembangan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan warganya guna mendukung agenda ekonominya. Mengerjakan rancangan **sistem pelatihan dan edukasi vokasi (vocational education and training/VET) yang efektif** bersama lebih dari 40 anggota dan negara berkembang, OECD dapat memobilisasi pengalaman dan pengetahuan internasional

untuk mendukung reformasi di beragam area prioritas, mulai dari pengembangan skema magang hingga cara baru untuk menilai keterampilan secara langsung, dan memfasilitasi pengakuannya di seluruh sektor formal dan informal.

Program untuk Penilaian Internasional Kompetensi Usia Dewasa (Programme for the International Assessment of Adult Competencies/PIAAC) OECD mengukur keterampilan dasar literasi, penghitungan, dan penyelesaian masalah di populasi usia dewasa. Indonesia (Jakarta) telah berpartisipasi dalam putaran kedua survei dan hasilnya telah dipublikasikan pada Juni 2016. Meski performa Indonesia tidak sebagus negara lain yang turut berpartisipasi dalam survei tersebut yang sebagian besar berprestasi tinggi, persentase negara berprestasi terbaik sama dengan yang ada di Gile dan Turki, dan sedikit lebih kecil dibanding persentase di Italia dan Spanyol.

www.oecd.org/education

www.oecd.org/employment/

www.oecd.org/cfe/leed/local-employment.htm



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Mengatasi ketidaksetaraan



Ketidaksetaraan yang lebih tinggi memunculkan tantangan ekonomis, politis, dan etis karena berisiko peningkatan orang yang tertinggal dalam perekonomian yang terus berubah.

OECD sedang melakukan tinjauan kualitas dari beragam database mengenai ketidaksetaraan dan kemiskinan di Indonesia untuk menganalisis tren dan kemungkinan untuk menyertakan indikator ketidaksetaraan pendapatan serta kemiskinan dalam database pendapatan OECD. Selain itu, analisis pendahulu dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (Indonesia Family Life Survey/

IFLS) RAND, yang tidak mencakup semua kawasan di Indonesia, tetapi bertujuan untuk menjadi perwakilan teritori tersebut, telah dilakukan. Analisis IFLS, bersama dengan modul Pendapatan dari SUSENAS 2005 digunakan untuk menghitung indikator ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan terkait. Temuan dari analisis data akan disertakan dalam laporan mengenai seluruh ketidaksetaraan dan pertumbuhan inklusif di negara berkembang. Laporan tersebut mendiskusikan tren dan tingkat dalam kondisi kehidupan, kualitas pekerjaan dan tenaga kerja, edukasi, dan kesehatan di Indonesia serta beberapa negara berkembang terpilih lainnya.

Meski rata-rata pertumbuhan Indonesia di atas 5% dalam satu dekade terakhir, meningkatkan kondisi sosial dan mengatasi ketidaksetaraan masih menjadi hambatan. Jaminan sosial telah terbukti sebagai mekanisme yang efektif untuk meningkatkan kesetaraan dan mendorong ketangguhan terhadap benturan, serta perlindungan terhadap risiko individu maupun kovariat, menjadikannya elemen kunci dalam pencegahan serta penghapusan kemiskinan dan untuk pertumbuhan yang inklusif. Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan sistem jaminan sosialnya, Indonesia tengah berpartisipasi dalam Program Jaminan Sosial Pusat Pengembangan UE-Finlandia-OECD. Proyek ini dilakukan di 10 negara mitra. Program tersebut mendukung negara dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Tinjauan Sistem Jaminan Sosial Indonesia saat ini tengah direncanakan, bekerja sama dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tinjauan tersebut memeriksa bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pasar tenaga kerja aktif, serta menyediakan rekomendasi terkait cara meningkatkan keefektifan lebih jauh.

www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm

www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/social-protection.htm



687 795 831 862 972



INDUSTRI DAN INOVASI

Membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan



Inovasi merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia bekerja sama dengan OECD untuk meningkatkan kontribusi kebijakan sains, teknologi, dan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan.

OECD merupakan pusat untuk diskusi pola sains, teknologi, dan inovasi (STI) global, serta dampaknya bagi kebijakan STI. Indonesia telah berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Kementerian OECD 2015 mengenai *Creating our Common Future through Science, Technology and Innovation* yang diadakan di Daejeon, Korea Selatan, dan mengadopsi Deklarasi Tingkat Kementerian, di mana 52 negara berkomitmen untuk mendukung STI guna memupuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 2016, Indonesia menyumbangkan informasi kebijakan khusus negara untuk publikasi unggulan dua tahunan OECD, *OECD Science, Technology and Industry*

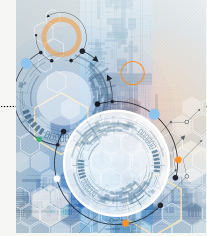
Outlook, yang mengamati megatren yang membentuk sistem STI di seluruh dunia.

Mendorong kapasitas inovatif – khususnya dalam aset berbasis ilmu pengetahuan – memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu dari enam negara ASEAN yang diperiksa dalam **Tinjauan OECD mengenai Inovasi di Asia Tenggara** pada tahun 2013. Studi tersebut menemukan bahwa rintangan terhadap risiko kewirausahaan menghambat pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang pesat, namun mempertahankan momentum perluasan sistem pendidikan tinggi secara cepat sehingga membantu Indonesia agar lebih baik dalam mengasah potensi inovasinya. Tinjauan tersebut dilengkapi oleh studi pada tahun 2014 tentang **National Intellectual Property Systems, Innovation and Economic Development**, yang mengajukan cara di mana Indonesia dapat menyempurnakan sistem IPR miliknya untuk mendukung inovasi. Indonesia juga berpartisipasi dalam proyek OECD terkait inovasi untuk pembangunan inklusif, yang membantu negara melakukan rekonsiliasi agenda pembangunan inklusif dan inovasinya

Sebagai bagian dari inisiatif beberapa tahun dengan negara-negara ASEAN, saat ini OECD tengah bekerja sama dengan Indonesia terkait kebijakan untuk meningkatkan produktivitas UKM. Pekerjaan ini akan menyediakan bukti serta rekomendasi bagi Indonesia dan negara tetangganya di ASEAN untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan persaingan bisnis. Elemen penting dari analisis tersebut memanfaatkan data mikro untuk menelusuri produktivitas di tingkat firma, dan OECD tengah berkolaborasi dengan pejabat statistik Indonesia untuk menghadirkan wawasan baru mengenai kinerja sektor manufaktur secara khusus.

www.oecd.org/sti/inno
www.oecd.org/sti/sci-tech
www.oecd.org/sti/ind/multiprod.htm
oe.cd/inclusive





Memanfaatkan teknologi digital

Seiring peningkatan penyebaran teknologi digital, pemerintah, pelaku bisnis, dan individu terus memindahkan aktivitas mereka ke internet. Indonesia telah terlibat dengan OECD terkait cara mengoptimalkan peluang digitalnya.

OECD telah menjadi pemimpin dalam mengidentifikasi potensi teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam Pertemuan Tingkat Kementerian terkini mengenai *The Digital Economy: Innovation, Growth and Social Prosperity*, Indonesia bergabung dengan hampir 40 negara dalam mengadopsi **Deklarasi Cancún**. Deklarasi tersebut mengakui bahwa ekonomi digital merupakan katalis penting, namun memanfaatkan potensinya mengharuskan negara mengadopsi pendekatan seluruh masyarakat dan holistik untuk merangsang investasi dalam konektivitas broadband dengan kecepatan lebih tinggi, menghilangkan halangan untuk menggunakan teknologi digital, memelihara inovasi, penelitian, dan peluang bisnis baru, memperkuat kepercayaan, dan mendorong kualitas kerja serta mengatasi kebutuhan keterampilan.

Masa depan ekonomi digital merupakan area di mana OECD dan Indonesia dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. **Tinjauan OECD mengenai Inovasi di Asia Tenggara** pada tahun 2013 menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam infrastruktur akan diperlukan untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan Indonesia. Secara khusus, infrastruktur ICT sangat buruk jika dibandingkan sebagian besar kawasan, yang memengaruhi cara hidup dan kerja orang, dan cara usaha kecil serta menengah didukung. Agar dapat berfokus pada kemacetan konkret ini, OECD mulai mengembangkan **SEA Going Digital: Connecting SMEs** pada tahun 2018, yang bertujuan untuk memeriksa peluang terkait akses dan penggunaan layanan digital oleh UKM di Asia Tenggara, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan menyediakan analisis kebijakan yang sehat guna mendukung lingkungan yang memungkinkan untuk keberhasilan transformasi digital. Inisiatif ini merupakan kontribusi terhadap Proyek Kanada-OECD untuk UKM ASEAN (Canada-OECD Project for ASEAN SMEs/COPAS), dan didasarkan pada upaya seputar proyek lintas-sektoral dan multidisipliner OECD *Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-being*.

www.oecd.org/internet
www.oecd.org/going-digital



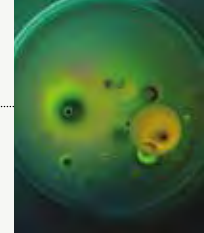
PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN



Meningkatkan keselamatan bahan kimia



Bioteknologi



OECD mendukung upaya negara untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan meningkatkan keselamatan bahan kimia, sehingga membuat kebijakan kontrol bahan kimia menjadi lebih transparan dan efisien, menghemat sumber daya untuk negara dan industri, serta mencegah distorsi yang tidak perlu dalam perdagangan bahan-bahan dan produk kimia.

Industri bahan kimia merupakan salah satu sektor industri terbesar dunia. Banyak negara memiliki kerangka kerja peraturan untuk mengelola bahan kimia, didasarkan pada pengujian dan penilaian kesehatan serta dampak lingkungannya. Karena banyak bahan kimia yang sama yang diproduksi di lebih dari satu negara (atau diperdagangkan antarnegara), pemerintah dapat menghindari pengujian ganda dan membagikan beban penilaian bahan kimia melalui OECD.

Elemen inti yang memungkinkan pemerintah bekerja sama pada penilaian bahan kimia adalah **Data Penilaian Bersama (Mutual Acceptance of Data/MAD) OECD dalam Penilaian Bahan Kimia**. MAD adalah perjanjian multilateral yang mengizinkan pengujian keamanan non-klinis dilakukan pada bahan-bahan dan produk kimia, seperti kimia industri dan pestisida, untuk dibagikan ke seluruh negara peserta. Sistem MAD mengharuskan pengujian dilakukan sesuai dengan **Pedoman Pengujian OECD dan Prinsip Praktik Laboratorium yang Baik (Principles of Good Laboratory Practice/GLP) OECD**. Dengan menghindari pengujian ganda dan memfasilitasi kolaborasi dalam penilaian kimia, sistem MAD menghemat prosedur bahan kimia dan pemerintah sebesar 150 juta euro setiap tahunnya, sekaligus memfasilitasi perdagangan produk kimia dan menciptakan peluang bisnis bagi laboratorium pengujian. MAD terbuka bagi negara di luar OECD dan, hingga saat ini, Argentina, Brasil, India, Malaysia, Singapura, serta Afrika Selatan telah bergabung dengan MAD. Thailand, yang saat ini berstatus Ikut Sementara, diharapkan juga akan bergabung di masa mendatang. Seminar mengenai GLP dan MAD OECD bertempat di Jakarta pada April 2018. Ini adalah langkah penting dalam menguatkan kerja sama dengan Indonesia untuk masalah yang berkaitan dengan MAD.

www.oecd.org/ehs/mad

50 · AKTIF BERSAMA INDONESIA

OECD juga membantu negara memastikan keamanan produk bioteknologi modern, seperti bibit padi, pohon, hewan, atau mikro organisme yang direkayasa secara genetik. OECD bekerja untuk menyelaraskan pendekatan penilaian keselamatan sembari memfasilitasi pembagian informasi yang digunakan dalam penilaian produk-produk ini, dan nantinya membantu negara meningkatkan efisiensi proses penilaian keamanan/risiko dan menghemat waktu serta sumber daya.

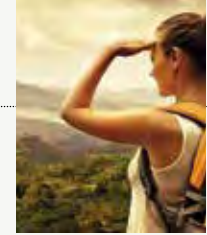
Indonesia berpartisipasi dalam kerja OECD terkait bioteknologi dan keamanan hayati. Komisi Keamanan Hayati nasional memeriksa permintaan untuk mengeluarkan produk rekayasa genetik ke lingkungan serta masalah keamanan makanan dan pakan. Serangkaian pedoman penilaian risiko, yang diselesaikan pada tahun 2016, berisi kerangka kerja peraturan. Beberapa jagung, kacang kedelai, tebu, dan kentang rekayasa telah disetujui untuk penggunaan makanan dan pakan, tetapi belum diperdagangkan. Varietas tebu tahan kemarau yang dikembangkan melalui penelitian publik telah disetujui untuk keamanan lingkungan, dan mungkin akan dibudidayakan di masa mendatang.

www.oecd.org/env/ehs/biotrack



PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN





Meningkatkan pariwisata

Pariwisata menyediakan kontribusi sosial dan ekonomi yang penting bagi negara. Pariwisata domestik dan internasional di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan beberapa tahun terakhir.

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, pariwisata menyumbang sekitar 4% ke PDB, dan kurang lebih 8,5% total lapangan kerja. Kedatangan internasional telah tumbuh dengan stabil selama dekade terakhir, dan menjadi sumber pendapatan kurs asing yang penting. Pada tahun 2016, kedatangan meningkat hingga hampir 11% menjadi 11,5 juta, sehingga menghasilkan penerimaan pariwisata internasional sebesar 13,6 juta USD, naik 12,5% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, jumlah perjalanan pariwisata domestik diperkirakan sebesar 255 juta – naik 1,5% dari tahun 2015.

Komite Pariwisata OECD merupakan alat yang unik bagi kerja sama multilateral, yang bertujuan untuk memperkuat peran kebijakan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata yang berkelanjutan melalui tindakan multidisiplin. Publikasi unggulan OECD, *OECD Tourism Trends and Policies 2018*, menganalisis kebijakan pariwisata dan data statistik dari 49 negara, termasuk negara anggota dan mitra ekonomi OECD.

Survei Ekonomi Indonesia OECD tahun 2018 memuat bab terkait potensi pariwisata sebagai pendorong untuk pembangunan regional yang berkelanjutan.

www.oecd.org/cfe/tourism



**OECD Tourism Trends
and Policies 2018**



OECD

PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN





LINGKUNGAN DAN ENERGI

Menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat



Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang serius terkait polusi air dan udara, pengelolaan limbah, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penipisan sumber daya alam, yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan peningkatan permintaan global atas komoditas. OECD telah menangani masalah ini selama bertahun-tahun dan dapat mendukung Indonesia untuk merancang kebijakan lingkungan yang tak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga efektif secara lingkungan.

Program Lingkungan OECD mendukung pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan lingkungan dengan menyediakan analisis aspek keuangan dan ekonomi dari perubahan iklim, pengelolaan air, efisiensi sumber daya, dan percakapan keanekaragaman hayati. Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan Komite Kebijakan Lingkungan sejak 2008.

Pada tahun 2017, OECD menerbitkan **Green Growth Policy Review**, yang akan berjalan hingga 2019. Tinjauan ini menilai tren utama dalam produktivitas sumber daya dan kualitas lingkungan Indonesia, serta kualitas lingkungan hidup warganya, berdasarkan indikator lingkungan utama terhadap udara, air, energi, keanekaragaman hayati, pemanfaatan lahan, limbah, penggunaan dan efisiensi sumber daya, serta iklim dan kesehatan. Bagaimana aspek pertumbuhan hijau diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan investasi infrastruktur, serta pemanfaatan lahan juga ditinjau di dalamnya. Tinjauan ini juga dilakukan dengan kolaborasi yang dekat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Green Growth Indicators OECD mencakup OECD dan negara-negara G20, dan ditujukan untuk membantu negara menilai serta membandingkan capaian mereka dalam menjauhkan ekonomi.

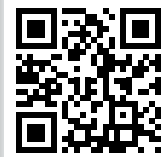
Database unik OECD terkait instrumen kebijakan untuk lingkungan (Policy Instruments for the Environment/PINE) mengumpulkan informasi enam jenis instrumen kebijakan kualitatif dan kuantitatif di 80 negara. OECD tertarik dalam perluasan cakupan PINE, dan telah mengundang Indonesia untuk menyumbangkan informasi.

Publikasi pada tahun 2016 yang berjudul **The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution**, yang mencakup Indonesia dalam analisis tren polusi udara luar ruangan global serta hasilnya, memberikan kerangka kerja untuk menilai dampak polusi udara luar ruangan terhadap potensi dan hasil ekonomi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan mengukur konsekuensi lingkungan dalam lingkup ekonomi.

www.oecd.org/environment/modelling

www.oecd.org/env/country-reviews

www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/pinedatabase.oecd.org



PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Mengatasi perubahan iklim

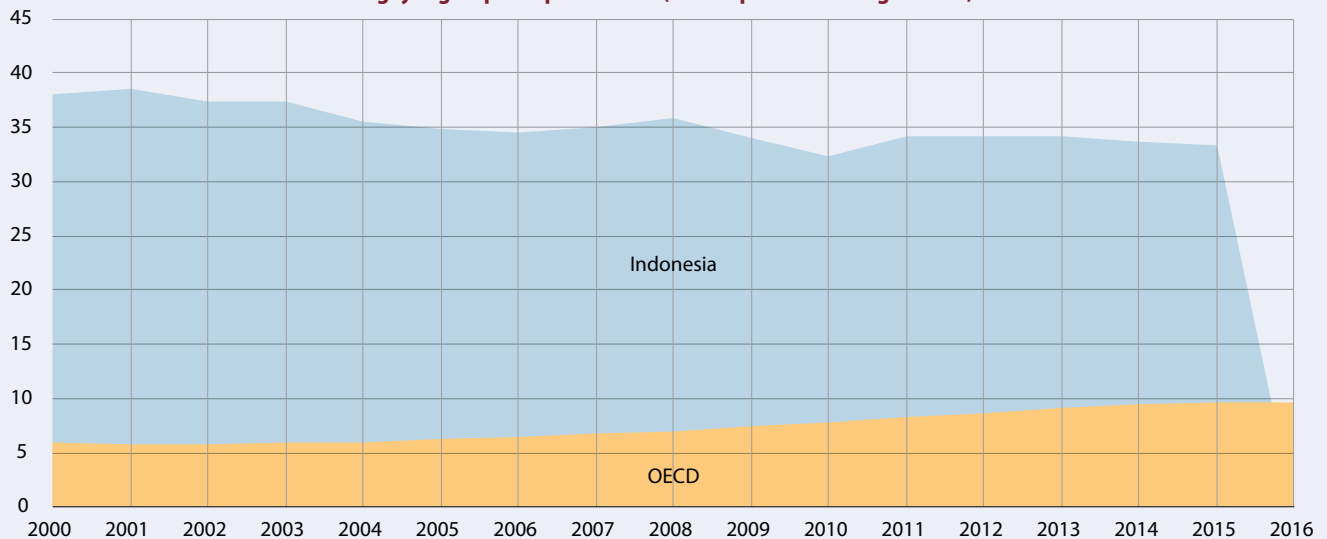
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca dan meminimalkan dampak perubahan iklim sembari menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Indonesia telah sangat aktif dalam Forum Global mengenai Lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Climate Change Expert Group (CCXG) OECD/IEA. Kerja CCXG terbaru mengangkat topik yang penting untuk Indonesia, termasuk rancangan Perjanjian Paris 2015, keefektifan pendanaan iklim internasional dan peningkatan transparansi pendanaan iklim, serta upaya-upaya mitigasi.

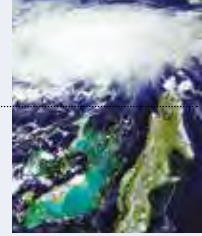
Selain itu, OECD telah menerbitkan atau tengah mengerjakan beberapa analisis lain yang relevan untuk Indonesia. Misalnya, laporan OECD yang berjudul *Investing in Climate, Investing in*

Growth, yang diterbitkan dalam Pertemuan Tingkat Presiden G20 Jerman pada tahun 2017, menilai bagaimana pemerintah G20 dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam waktu yang singkat, sembari meraih kemajuan ke arah tujuan iklim untuk mengamankan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Pada Desember 2017, OECD dan Kementerian Keuangan Indonesia menyelenggarakan seminar terkait Mengejar Agenda Pertumbuhan Rendah Karbon di Indonesia untuk menerbitkan laporan tersebut. Laporan ini memberikan peluang bagi pakar di Indonesia untuk menunjukkan pandangan mereka dan mendiskusikan peluang serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisinya menuju ekonomi rendah karbon. OECD kini memimpin proyek tindak lanjut yang dimandatkan oleh G20 terkait *Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure*, yang bertujuan untuk membantu negara membuat alur keuangan yang konsisten dengan jalur ke arah emisi rendah dan pembangunan yang tahan iklim.

Energi yang Dapat Diperbaharui (% dari pasokan energi utama)



Sumber: OECD (2018), *Renewable energy*. doi.org/10.1787/aac7c3f1-en



Laporan **OECD Climate Change Mitigation: Policies and Progress** menyajikan tren dan kemajuan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Greenhouse Gas/GHG) di Indonesia dan negara lain. Laporan ini menganalisis kebijakan dan target mitigasi Indonesia, termasuk untuk sektor energi dan pemanfaatan lahan, perubahan pemanfaatan lahan dan kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF). Kerja OECD yang tengah berjalan terkait iklim, pemanfaatan lahan, ekosistem, dan pangan mengupayakan keselarasan dalam kaitan ini, dan menggunakan contoh dari Indonesia. Selain itu, **Green Growth Policy Review** Indonesia akan memiliki bab yang dikhususkan untuk kebijakan dalam sektor pemanfaatan lahan, dan dampaknya bagi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta tantangan pembangunan dan lingkungan lainnya.

Selain LULUCF, energi menyumbang persentase emisi GHG terbesar di Indonesia. Pajak energi, reformasi subsidi bahan bakar

fosil yang tidak efektif, dan kebijakan energi lain, karenanya dapat secara signifikan memengaruhi tren emisi di Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia, bersama dengan Italia, setuju untuk mengupayakan penelaahan sejawat terkait subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dalam G20. Strategi tersebut dilakukan di Indonesia, dan dipimpin oleh OECD. Contoh kerja relevan lainnya mencakup laporan kerja OECD yang berjudul **Modelling the Distributional Impacts of Energy Subsidy Reform: an illustration with Indonesia**, yang menyelidiki dampak kebijakan lingkungan terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta **Taxing Energy Use**, yang memerinci struktur dan tingkat pajak penggunaan energi di Indonesia dan negara lain.

www.compareyourcountry.org/cop21

www.oecd.org/env/cc/ccxg.htm

www.oecd.org/environment/cc/climate-futures
oe.cd/G20climate





Investing in Climate,
Investing in Growth

OECD



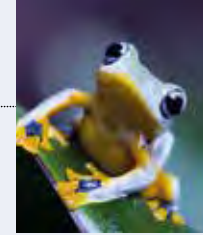
Taxing Energy Use 2018
COMPANION TO THE TAXING ENERGY USE DATABASE

OECD



..... PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaan yang berkelanjutan



Keanekaragaman hayati penting untuk hidup berkelanjutan dan menyediakan layanan ekosistem penting, seperti penyaring air, pembersih udara, daur ulang nutrisi, dan peraturan iklim. Layanan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Analisis OECD berfokus pada penilaian keanekaragaman hayati dan penggunaan instrumen ekonomi serta pendekatan kebijakan lain untuk mendukung konservasi dan penggunaan layanan ekosistem serta keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Publikasi OECD (2018) yang berjudul **Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development**, memanfaatkan pengalaman dan wawasan dari 16 negara dengan keragaman terbesar, untuk menelaah cara pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam empat area utama: 1) di tingkat nasional, termasuk rencana pembangunan nasional dan strategi lainnya, koordinasi institusional, dan anggaran nasional; 2) sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan; 3) dalam kerja sama pembangunan; dan 4) pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan keanekaragaman hayati serta cara meningkatkannya.

Pada tahun 2017, publikasi mengenai **Marine Protected Areas: Economics, Management and Effective Policy Mixes** memeriksa nilai ekosistem laut dan cara area perlindungan laut dapat dirancang dan dikelola secara lebih efektif. Kerja ini, yang memanfaatkan wawasan dari Indonesia, menganalisis gabungan kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pelestarian dan penggunaan lingkungan laut yang berkelanjutan.

Pada tahun 2013, publikasi berjudul **Scaling-up Finance Mechanisms for Biodiversity** memeriksa potensi enam instrumen (termasuk reformasi fiskal lingkungan, pembayaran untuk layanan ekosistem, dan pasar untuk produk hijau) untuk memobilisasi keuangan dan cara perancangan serta implementasi terbaiknya untuk mencapai tujuan secara lebih efektif. Laporan tersebut menyertakan contoh dari Indonesia terkait kehutanan yang berkelanjutan dan reformasi subsidi pestisida. Reformasi subsidi pestisida Indonesia juga disorot dalam publikasi tahun 2017 berjudul **The Political Economy of Biodiversity Policy Reform**, yang mengamati pendorong reformasi, jenis rintangan yang dihadapi, fitur utama reformasi kebijakan, dan hasil pembelajaran.

www.oecd.org/env/biodiversity

Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development

The Political Economy of Biodiversity Policy Reform

PINDAI UNTUK MEMBACA LAPORAN

Marine Protected Areas: ECONOMICS, MANAGEMENT AND EFFECTIVE POLICY MIXES

Memperkuat kemitraan global terkait energi bersih dan efisiensi energi



Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA), sebuah badan otonomi dalam OECD, terus memperdalam keterlibatan dengan Indonesia, negara Asosiasi IEA, khususnya dalam Program Transisi Energi Bersih yang dimilikinya.

Indonesia merupakan konsumen energi terbesar di Asia Tenggara, dan eksportir energi besar. Dengan permintaan energi di Indonesia yang diproyeksikan meningkat hingga lebih dari 80% pada tahun 2040, peran dan pengaruh negara ini dalam peta energi global terus meningkat. Mempertimbangkan kepentingan strategis Indonesia di Asia Tenggara dan komitmennya untuk secara aktif berpartisipasi dalam transisi energi bersih global, IEA menyambut Indonesia sebagai Negara Asosiasi di Pertemuan Tingkat Kementerian IEA pada November 2015. Dalam Pertemuan Tingkat Kementerian IEA pada November 2017, IEA memperbarui Program

Kerja Bersamanya dengan Indonesia untuk 2018-2019. Program kerja ini mencakup semua sektor energi dan area kebijakan energi, termasuk energi yang dapat diperbaharui, efisiensi energi, teknologi energi, data dan statistik, serta minyak, gas, dan batu bara.

Kemitraan IEA dengan Indonesia pada transisi energi, energi bersih, dan efisiensi energi didorong kuat oleh Program Transisi Energi Bersih (Clean Energy Transitions Programme/CETP) IEA. CETP, yang diresmikan oleh menteri-menteri energi di Pertemuan Tingkat Kementerian IEA pada tahun 2017, memanfaatkan keahlian energi unik IEA di seluruh bahan bakar dan teknologi untuk mempercepat transisi energi bersih global, khususnya di negara berkembang yang besar. CETP mencakup kerja analitik kolaboratif, kerja sama teknis, pembangunan kapasitas dan pelatihan, serta dialog strategis. Indonesia adalah salah satu dari enam negara fokus untuk kemitraan CETP.



Indonesia memperbarui Program Kerja Bersamanya dengan negara asosiasi dan mitra lainnya pada acara sampingan Pertemuan Tingkat Kementerian IEA di Paris pada November 2017.

Memperkuat kemitraan global terkait energi bersih dan efisiensi energi

Kolaborasi IEA dengan Indonesia didukung oleh keterlibatan tingkat tinggi berkala antara Direktur Eksekutif IEA dan menteri-menteri Indonesia – misalnya selama kunjungan resmi Direktur Eksekutif ke Jakarta pada Juli 2018. Sorotan terkini kerja sama Indonesia-IEA mencakup:

- **Efisiensi energi**

IEA memiliki sejarah kolaborasi yang panjang dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Indonesia mengenai efisiensi energi, yang memberikan saran kebijakan dan pembangunan kapasitas langsung terkait kebijakan efisiensi untuk sektor penggunaan akhir energi utama. Indonesia merupakan salah satu dari enam negara fokus program Efisiensi Energi dalam Ekonomi Berkembang (Energy Efficiency in Emerging Economies/E4) IEA, yang bertujuan untuk mendukung ekonomi berkembang dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memperoleh manfaat efisiensi energi. Kementerian ESDM telah menyetujui rencana kerja khusus untuk Indonesia hingga 2020. Dalam rencana kerja ini, IEA dan Kementerian ESDM menyelenggarakan Minggu Pelatihan Efisiensi Energi kedua untuk Asia Tenggara di Jakarta pada Juli 2018; salah satu kegiatan pembangunan kapasitas terbesar yang dilakukan oleh IEA di luar Paris. Berbarengan dengan kegiatan pembangunan kapasitas, program E4 menyediakan bantuan teknis kepada Kementerian ESDM, yang berfokus pada efisiensi energi industri, dan mendukung pengembangan kode energi pembangunan, serta standar pencahayaan dan peralatan listrik.

- **Energi dan tenaga listrik yang dapat diperbaharui**

IEA telah mengembangkan paket kerja bersama yang sedang berjalan bersama Kementerian ESDM terkait masalah sektor daya dan energi yang dapat diperbaharui dalam CETP, yang akan berjalan hingga 2020. Paket kerja ini memiliki tiga komponen utama:

- Mendorong investasi energi bersih. Memberikan saran dan panduan sesuai permintaan kepada pembuat kebijakan energi terkait masalah yang mencakup praktik terbaik kebijakan dan kerangka kerja investasi, keberlanjutan keuangan sektor tenaga listrik, serta mekanisme untuk mengontrol risiko investor dan memperkuat kelayakan perbankan proyek.
- Peningkatan energi yang dapat diperbarui. Analisis cara yang dapat digunakan Indonesia untuk mengurangi biaya energi yang dapat diperbarui, selaras dengan tolok ukur internasional, dan pengembangan strategi untuk secara efektif mengintegrasikan bagian kecil sumber daya yang dapat diperbaharui dengan biaya sehemat mungkin ke dalam sistem tenaga.
- Reformasi pasar tenaga dan perencanaan yang terintegrasi. Bantuan teknis kepada Kementerian ESDM terkait cara meningkatkan fungsi sistem tenaga listrik pembeli tunggal Indonesia dan mengidentifikasi prioritas untuk reformasi pasar tenaga listrik, termasuk pembagian praktik terbaik untuk proses perencanaan listrik terintegrasi.

- **Data dan statistik**

Data kualitas tinggi merupakan basis kebijakan energi yang efektif. Terkait hal tersebut, Pusat Data Energi IEA memiliki sejarah kolaborasi yang panjang dengan Indonesia dalam bidang ini. Hal ini telah dipercepat di bawah CETP, dan target penguatan data pada sisi persediaan maupun permintaan. Di sisi persediaan, hal ini melibatkan penguatan kualitas produksi dan melihat penggunaan serta perdagangan bahan bakar utama, sementara di sisi permintaan, melibatkan konsumsi dan pemetaan energi yang lebih baik di seluruh rentang penggunaan akhir energi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemampuan badan-badan Indonesia untuk menetapkan keseimbangan energi kerja. Kolaborasi lintas kementerian sangat penting, dan, melalui lokakarya rutin, IEA

terus memegang peranan penting dalam menyatukan beragam pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan data bersama.

- **Kendaraan listrik**

Kolaborasi terkait kendaraan listrik merupakan area keterlibatan baru antara Indonesia dan IEA di bawah CETP, dengan Indonesia berupaya memperkuat peningkatan dan penetrasi kendaraan listrik. IEA berada dalam proses membangun kemitraan dengan Kementerian ESDM untuk menjadikan Bali sebagai 'pulau yang layak untuk kendaraan listrik,' yang memberikan panduan terkait kebutuhan infrastruktur, implikasi sistem tenaga listrik, dan peluang manufaktur setempat, dengan tujuan akhir menjadikannya memenuhi syarat untuk pendanaan skala besar dari Fasilitas Lingkungan Global.

- **Aktivitas lain**

IEA mempertahankan jumlah bidang kemitraan lain dengan Indonesia, yang mungkin paling dominan berada di bidang ketahanan energi. IEA memberikan panduan kepada pembuat keputusan Indonesia terkait pengembangan kebijakan terkait penumpukan minyak dan tanggap darurat, serta, selain partisipasi dalam Latihan Tanggap Darurat IEA, baru-baru ini pejabat Indonesia menjalani kunjungan studi ke negara-negara anggota IEA untuk mengamati pendekatan mereka terhadap ketahanan minyak. Indonesia telah melakukan Penilaian Tanggap Darurat pada tahun 2014, dan menyajikan tinjauan tengah semester mengenai hal ini di Paris pada September 2017. Baru-baru ini, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam latihan IEA terkait modal, dan telah membuat (serta menguji) hotline situasi darurat untuk komunikasi yang berkaitan dengan ketahanan energi.

www.iea.org
www.iea.org/cetp
www.iea.org/topics/energyefficiency/e4/



Lampiran

OECD merupakan organisasi antarpemerintah yang dibuat untuk mendukung kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi orang-orang di seluruh dunia. OECD menyediakan forum di mana pemerintah dapat bekerja bersama untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi permasalahan umum. Pemerintah negara Anggota dan Mitra yang bekerja dengan Organisasi untuk memahami pendorong utama perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. OECD mengukur produktivitas serta jalur perdagangan dan investasi global, menganalisis dan membandingkan data untuk memprediksi tren di masa mendatang, dan menetapkan standar internasional ke beragam masalah.

HUBUNGAN GLOBAL

Melalui pembangunan hubungan selama 50 tahun terakhir, OECD telah mengubah dirinya menjadi organisasi global, dengan 36 Anggota dari Amerika, Eropa, Asia, dan Oseania, termasuk negara maju maupun berkembang. Sejak 2007, OECD telah mengidentifikasi Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, dan Afrika Selatan sebagai “Mitra Utama” dan telah bekerja sama secara substansial dengan negara-

negara tersebut. Kolombia dan Kosta Rika sedang berada dalam proses penambahan menuju keanggotaan OECD.

Hubungan global OECD juga mencakup kawasan kepentingan strategis, termasuk Asia Tenggara, Eropa Tenggara, Eurasia, Timur Tengah, dan Afrika Utara, serta Amerika Latin dan Karibia. OECD juga mendirikan sekretariat sejumlah program internasional seperti Satuan Tugas Tindakan Keuangan terhadap Pencucian Uang.

FAKTA SINGKAT

Sejarah: didirikan pada tahun 1961

Markas Utama: Paris, Prancis

Keanggotaan: 36 negara

Mitra Utama: 5 negara (Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, dan Afrika Selatan)

Tambahan: 2 negara (Kolombia, Kosta Rika)

Program Negara: 4 negara (Kazakhstan, Maroko, Peru, Thailand)

Program Regional: 5

Sekretaris Jenderal: Angel Gurría

Publikasi: 250 judul baru/tahun

Komite: Hampir 300 Komite, Kelompok Kerja, dan Satuan Tugas



Château de la Muette,
Markas Besar OECD.

STRUKTUR TATA KELOLA

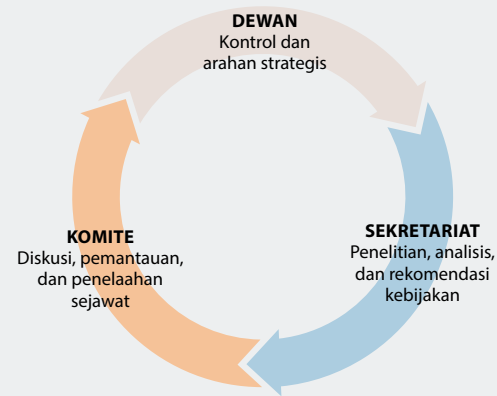
OECD didirikan dengan struktur Dewan, Komite, dan Sekretariat:

- Kemampuan pengambilan keputusan terletak di Dewan OECD. Mengontrol fungsi Organisasi dan memberikan arahan strategis, Dewan terdiri dari seorang perwakilan per negara anggota ditambah perwakilan dari Komisi Eropa, dan mengambil keputusan dengan konsensus.
- Di tingkat Komite, perwakilan negara anggota dan negara dengan status Pengawas dari delegasi permanen untuk OECD atau ibu kotanya, berpartisipasi dalam pertemuan, untuk meminta, meninjau, dan berkontribusi pada pekerjaan yang dilakukan Sekretariat. Ketentuan untuk partisipasi mitra dalam komite dibahas di halaman 63.
- Sekretariat mengumpulkan data, melakukan penelitian dan menganalisis serta membuat proposal kebijakan. Sekretaris Jenderal mengepalai Sekretariat dan dibantu oleh satu atau beberapa Wakil Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal juga memimpin Dewan, yang berfungsi sebagai penghubung antara delegasi nasional dan Sekretariat.

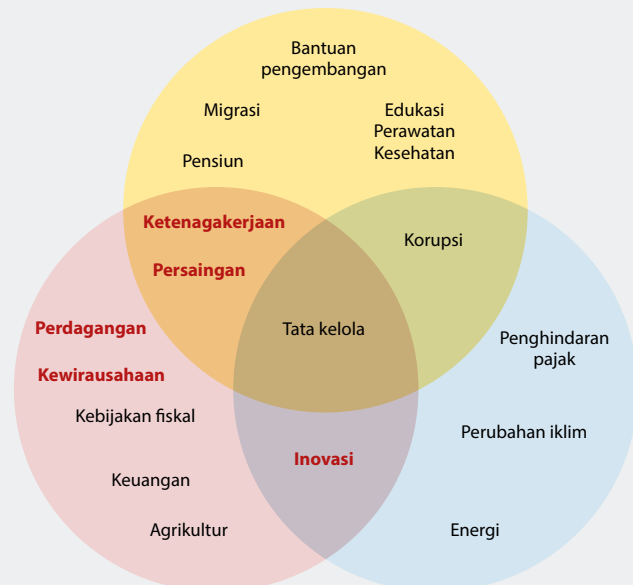
METODE KERJA

Melalui IECD, pemerintah bekerja bersama-sama dengan pendekatan multidisipliner untuk menyusun panduan kebijakan berbasis bukti, yang meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk parlemen, masyarakat bisnis, dan masyarakat sipil. Pada basis statistik perbandingan yang dikumpulkan seluruh pemerintah anggota dan mitra, Sekretariat OECD menganalisis pengalaman kebijakan negara dan mengidentifikasi praktik terbaik, untuk memberi informasi bagi pembuatan kebijakan di negara peserta dan di luar peserta. "Penelaahan sejawat", didasarkan pada dialog dan pembangunan konsensus, memungkinkan pemantauan kemajuan reformasi yang efektif dalam berbagai area kebijakan. Praktik terbaik yang diidentifikasi dan rekomendasi kebijakan berkontribusi terhadap perancangan standar internasional baru dalam bentuk "instrumen" sebagaimana dijelaskan di halaman 62

Struktur tata kelola OECD



OECD bekerja dalam berbagai area kebijakan



Lampiran

PERANGKAT HUKUM OECD

OECD telah mengembangkan berbagai perangkat hukum berdasarkan kerja substantif yang dilakukan dalam Komite Organisasi, banyak yang telah menjadi standar global. Perangkat hukum ini didasarkan pada pelaporan dan analisis mendalam yang dilakukan dalam Sekretariat dan mencakup berbagai topik. Ketetapan OECD (yaitu perangkat hukum yang diadopsi oleh Dewan OECD) antara lain adalah:

- **Keputusan** bersifat mengikat secara hukum atas semua Pengikut. Meski bukan perjanjian internasional, keputusan ini mengharuskan jenis kewajiban hukum yang sama dengan yang telah disetujui dalam perjanjian internasional. Pengikut harus menerapkan Keputusan dan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk penerapan tersebut.
- **Rekomendasi** tidak mengikat secara hukum, tetapi praktiknya memberikan kekuatan moral sebagai perwakilan keinginan politis Pengikut, dan diharapkan Pengikut akan mengupayakan yang terbaik untuk menerapkannya.

Perangkat hukum lain juga dikembangkan dalam kerangka kerja Organisasi:

- **Deklarasi** merupakan teks resmi yang menetapkan komitmen kebijakan yang kurang lebih sesuai dengan yang disetujui oleh Pengikut.
- **Pengaturan dan Pemahaman** bukanlah perangkat yang mengikat secara hukum dan dinegosiasikan serta diadopsi dalam kerangka kerja Organisasi oleh beberapa Anggota dan/atau selain Anggota.
- **Perjanjian Internasional** dapat disimpulkan dalam kerangka kerja Organisasi dan mengikat Pihak, yang dapat berupa Anggota maupun selain Anggota, secara hukum.

Mendekatkan Indonesia dan negara mitra lain dengan perangkat OECD merupakan prioritas penting bagi Organisasi. Sebuah upaya bersama tengah dilakukan untuk lebih lanjut mengintegrasikan perspektif Indonesia dan negara mitra lain dalam kegiatan pengaturan standar OECD. Secara khusus, partisipasi Indonesia dan negara Mitra Utama lain dalam mengembangkan perangkat baru dan merevisi perangkat yang sudah ada sangat penting untuk memastikan relevansi globalnya.

SAAT INI INDONESIA MENAATI 12 PERANGKAT HUKUM OECD BERIKUT:

Keefektifan bantuan:

- Deklarasi Paris mengenai Keefektifan Bantuan

Agrikultur:

- Deklarasi mengenai Kebijakan yang Lebih Baik untuk Mencapai Sistem Pangan Global yang Produktif, Berkelanjutan, dan Tangguh

Tata kelola perusahaan:

- Rekomendasi dari Dewan terkait Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Ekonomi digital:

- Deklarasi terkait Ekonomi Digital: Inovasi, Pertumbuhan, dan Kesejahteraan Sosial (Deklarasi Cancun)
- Deklarasi terkait Kebijakan Sains, Teknologi, dan Inovasi untuk Era Global dan Digital (Deklarasi Daejeon)
- Deklarasi untuk Masa Depan Ekonomi Internet (Deklarasi Seoul)

Usaha kecil menengah:

- Piagam Bologna mengenai Kebijakan UKM
- Deklarasi Kementerian Istanbul mengenai Dukungan Pertumbuhan Persaingan UKM Internasional dan Inovatif

Pajak:

- Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Langkah Terkait Perjanjian Pajak guna Mencegah BEPS
- Konvensi mengenai Bantuan Administratif Bersama terkait Urusan Pajak, sebagaimana diberi amendemen oleh Protokol 2010
- Deklarasi mengenai Pertukaran Informasi Otomatis terkait Urusan Pajak
- Deklarasi mengenai BEPS

Usaha kecil menengah:

- Piagam Bologna mengenai Kebijakan UKM
- Deklarasi Kementerian Istanbul mengenai Dukungan Pertumbuhan Persaingan UKM Internasional dan Inovatif

BADAN OECD

Negara selain Anggota dapat berpartisipasi dalam Komite OECD sebagai:

- **Anggota/Associate** yang berpartisipasi dalam sebuah Komite, proyek, atau pengembangan maupun revisi perangkat hukum yang umumnya memiliki jangka waktu tak terbatas dengan hak dan kewajiban yang sama seperti Anggota OECD, dengan pengecualian untuk diskusi terkait penambahan Anggota baru ke Organisasi, kepatuhan negara di luar Anggota terhadap perangkat hukum yang belum dipatuhi negara Associate tersebut atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan.
- **Peserta** yang berpartisipasi dalam Badan OECD, kecuali dalam diskusi yang ditandai sebagai rahasia, umumnya dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

SAAT INI INDONESIA BERPARTISIPASI DALAM ENAM BADAN OECD

Dengan status **Associate** atau **anggota** (*hak penuh*):

- Proyek terkait BEPS
- Badan Energi Internasional (Negara Rekan)
- Dewan Negara Peserta pada Program untuk Penilaian Internasional Kompetensi Usia Dewasa (Programme for International Assessment of Adult Competencies/PIAAC)
- Komite Investasi: Meja Bundar Kebebasan Investasi
- Forum Global mengenai Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak
- Dewan Tata Kelola Pusat Pengembangan

Dengan status **Peserta** (*hanya menghadiri sesi terbuka*):

- Komite Urusan Fiskal (semua badan)
- Komite Persaingan
- Dewan Tata Kelola Program untuk Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA)

INDONESIA JUGA BERPARTISIPASI DALAM SEJUMLAH JARINGAN OECD, TERMASUK:

- Meja Bundar OECD-ASIA terkait Tata Kelola Perusahaan
- Seminar Regional OECD-Asia mengenai Peningkatan Transparansi dan Pemantauan Pasar Asuransi
- Inisiatif Anti-Korupsi ADB/OECD untuk Asia Pasifik
- Jaringan Pejabat Anggaran Senior untuk Asia
- Meja Bundar OECD-ADBI mengenai Migrasi Tenaga Kerja di Asia
- Strategi Keterampilan dan Ketenagakerjaan OECD di Asia Tenggara (Employment and Skills Strategies in Southeast Asia/ESSA)
- Meja Bundar Kawasan Asia Gabungan Pusat Pengembangan OECD-AMRO
- Inisiatif Kerja Sama terkait Reformasi Peraturan APEC-OECD
- Program Investasi ASEAN-OECD
- Jaringan Pejabat Anggaran Senior OECD-Asian
- Meja Bundar OECD-ADBI mengenai Reformasi Pasar Modal di Asia
- Pusat Kebijakan OECD-Korea Selatan, Program Persaingan

INDONESIA TELAH TERINTEGRASI DENGAN BAIK DALAM SALURAN DIALOG DAN DATABASE OECD:

Dialog kebijakan antara Indonesia dan OECD juga menangani penyertaan perspektif sektor swasta. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) bekerja bersama Komite Penasihat Serikat Buruh (Trade Union Advisory Committee/TUAC) untuk OECD guna memastikan bahwa kepentingan tenaga kerja terwakili dalam diskusi kebijakan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia juga memberikan perspektifnya sebagai anggota Komite Penasihat Industri dan Bisnis (Business and Industry Advisory Committee/BIAC) untuk OECD.

Indonesia juga telah terintegrasi dengan baik dalam database statistik OECD, mencakup beragam topik seperti perdagangan, FDI, pendidikan, dan industri. Organisasi tersebut juga telah membuat profil statistik negara untuk Indonesia, yang menyediakan gambaran singkat data yang dipilih dari 40 database statistik lebih (OECD dan di luar OECD). Profil ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui sumber sekunder dari *OECD Factbook*.

Lampiran



OECD menyambut partisipasi Indonesia lebih lanjut dalam badan, instrumen, dan tinjauan kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda!

An illustration featuring two hands holding a smartphone and a tablet. The tablet displays the word "NEWS". Surrounding the devices are various icons representing data, technology, and communication, such as a clock, a gear, a magnifying glass, a bar chart, a pie chart, a percentage sign, and a group of people.

Untuk berita dan informasi tentang kerja OECD bersama Indonesia: www.oecd.org/indonesia



Untuk informasi selengkapnya tentang kerja sama OECD dengan Asia Tenggara: www.oecd.org/southeast-asia

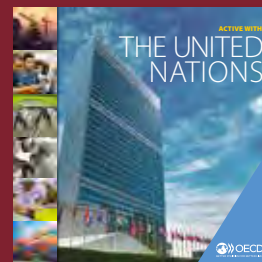
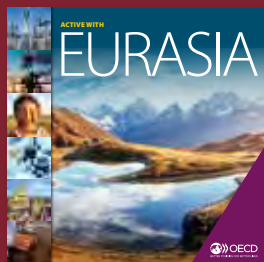


OECD iLibrary

Temukan laporan, data, dan analisis tentang Brasil serta negara dengan ekonomi utama dunia di **OECD iLibrary**, basis pengetahuan global – www.oecd-ilibrary.org



OECD: Jaringan Kebijakan Global



Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD) merupakan organisasi internasional yang membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola ekonomi global. OECD menyediakan pengaturan di mana pemerintah dapat membandingkan pengalaman kebijakan, mencari jawaban untuk masalah-masalah umum, mengidentifikasi praktik terbaik, dan bekerja untuk koordinasi kebijakan domestik serta internasional

Negara Anggota OECD yaitu: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cile, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.



Global Relations Secretariat

OECD, 2 rue André Pascal

75775 Paris Cedex 16

France

www.oecd.org/globalrelations

GRS.contact@oecd.org

www.oecd.org/indonesia

Oktober 2018